



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**



**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024
(AUDITED)**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun laporan keuangan. Terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 93 Tahun 2012 Tanggal 17 Desember 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2008 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 05 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

Penyusunan Laporan Keuangan AkruaI terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024, telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Barat,



Drs. BARIJUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660630 199103 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
II. LAPORAN OPERASIONAL	vi
III. NERACA	vii
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	viii
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	6
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
APBD	8
2.1 Ekonomi Makro.....	8
2.2 Kebijakan Keuangan	9
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	9
2.4 Penjelasan Atas Pencapaian Target Kinerja	28
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	33
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	33
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	49
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	54
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	54
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan	54
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	55
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	58
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	59
5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran	59
5.1.1 Pendapatan LRA	59
5.1.2 Belanja	60
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca	68
5.2.1 Aset	68
5.2.2 Kewajiban	91
5.2.3 Ekuitas Dana	95
5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)	95
5.3.1 Pendapatan LO	95

5.3.2 Beban.....	96
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	108
5.5 Pengungkapan atas pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Standar akuntansi Pemerintah Daerah.....	112
BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	114
6.1 Tugas Pokok SKPD	114
6.2 Komposisi Pegawai	114
BAB VII. PENUTUP.....	118

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1.a Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan sisa UYHD Tahun 2024
- LAMPIRAN 1.b Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2024 dan Realisasi Pendapatan & Belanja BLUD Tahun 2024
- LAMPIRAN 2 Daftar Rekapitulasi Pendapatan LRA SKPD Tahun 2024
- LAMPIRAN 3 LRA, LO, NERACA dan LPE SKPD Tahun 2024 dari Aplikasi SIPKD
- LAMPIRAN 4 LRA SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun 2024
- LAMPIRAN 5 Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2024 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU,TU,LS
- LAMPIRAN 6 Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2024 (Contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja
- LAMPIRAN 7 Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Des 2024
- LAMPIRAN 8 Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Des 2024
- LAMPIRAN 9 Daftar Piutang Lain-lain PAD yang sah dan Penyisihannya per 31 Des 2024
- LAMPIRAN 10 Daftar Pendapatan Diterima di Muka per 31 Des 2024 (Tidak termasuk sewa rumah dinas)
- LAMPIRAN 11 Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Desember 2024
- LAMPIRAN 12 Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2024
- LAMPIRAN 13 Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2024
- LAMPIRAN 14 Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Rumah Dinas Tahun 2024
- LAMPIRAN 15 Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) beserta Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2024
- LAMPIRAN 16 Daftar Persediaan per 31 Desember 2024
- LAMPIRAN 17 Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024
- LAMPIRAN 18 Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2023 beserta Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024
- LAMPIRAN 19 Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset lainnya 2024
- LAMPIRAN 20 Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024
- LAMPIRAN 21 Daftar Belanja Modal Tahun 2024
- LAMPIRAN 22 Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Tahun 2024
- LAMPIRAN 23 Daftar Belanja Barang Jasa yang Dikapitalisir 2024
- LAMPIRAN 24 Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2024
- LAMPIRAN 25 Register SP2D SKPD Tahun 2024
- LAMPIRAN 26.a Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD-Khusus Rumah Sakit Daerah & Dinkes
- LAMPIRAN 26.b Daftar Laporan Operasional BLUD-Khusus Rumah Sakit Daerah & Dinkes
- LAMPIRAN 27 Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
- LAMPIRAN 28 Jurnal Penyesuaian 2024
- LAMPIRAN 29 **Lampiran Lainnya:**
- 1) Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan & Belanja (LRA dan LO) bulan Des 2024
 - 2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2024
 - 3) Berita Acara Opname Kas Bendahara Penerimaan per 31 Des 2024
 - 4) Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Des 2024
 - 5) Bank Statement untuk saldo rekening Bendahara Pengeluaran di Bank per 31 Des 2024
 - 6) Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Des 2024
 - 7) Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Des 2024
 - 8) Berita Acara Opname Persediaan per 31 Des 2024
 - 9) Rekapitulasi Laporan BOS
 - 10) Rekapitulasi Laporan BLUD
 - 11) Rekapitulasi Laporan BKK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Akrual Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Barat,



Drs. BARLIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660630 199103 1 006



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36,362,357,537.00	31,766,198,054.41	87.36	3,201,186,541.00
4.1.02	Retribusi Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	36,357,357,537.00	31,761,198,054.41	87.36	3,196,186,541.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	36,362,357,537.00	31,766,198,054.41	87.36	3,201,186,541.00
	JUMLAH PENDAPATAN	36,362,357,537.00	31,766,198,054.41	87.36	3,201,186,541.00
5	BELANJA DAERAH	2,523,027,437,087.00	2,410,380,936,204.10	95.54	2,153,688,309,801.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,190,837,411,628.00	2,133,684,893,265.10	97.36	1,861,680,170,647.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,626,736,829,717.00	1,592,002,002,278.00	97.86	1,350,697,303,210.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487,934,231,911.00	465,353,149,307.10	95.37	436,856,356,961.00
5.1.05	Belanja Hibah	76,166,350,000.00	76,229,743,680.00	99.43	74,126,510,476.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,190,837,411,628.00	2,133,684,893,265.10	97.36	1,861,680,170,647.00
5.2	BELANJA MODAL	332,190,025,459.00	277,296,042,939.00	83.48	292,008,139,154.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126,412,225,761.00	99,093,872,050.00	78.39	94,251,479,922.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162,502,995,731.00	134,567,124,579.00	82.81	157,443,270,289.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43,274,803,967.00	43,635,046,310.00	100.83	40,313,388,543.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	332,190,025,459.00	277,296,042,939.00	83.48	292,008,139,154.00
	JUMLAH BELANJA	2,523,027,437,087.00	2,410,380,936,204.10	95.54	2,153,688,309,801.00
	SURPLUS/DEFISIT	(2,486,665,079,550.00)	(2,378,614,738,149.69)	95.65	(2,150,487,123,260.00)

Provinsi Sumatera Barat, 31 Desember 2024
Kepala DINAS PENDIDIKAN



Drs. S. M. L. M. M.
NIP. 196406301991631006



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	31.808.656.636,64	3.169.866.338,97	28.638.790.297,67	903,47
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	31.808.656.636,64	3.169.866.338,97	28.638.790.297,67	903,47
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	31.803.656.636,64	3.164.866.338,97	28.638.790.297,67	904,90
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	31.808.656.636,64	3.169.866.338,97	28.638.790.297,67	903,47
	JUMLAH PENDAPATAN	31.808.656.636,64	3.169.866.338,97	28.638.790.297,67	903,47
8	BEBAN	2.270.306.698.331,72	2.025.070.784.103,86	245.235.914.227,86	12,11
8.1	BEBAN OPERASI	2.146.182.826.850,00	1.878.134.222.297,63	268.048.604.552,37	14,27
8.1.01	Beban Pegawai	1.592.415.387.962,00	1.358.476.691.755,00	233.938.696.207,00	17,22
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	478.037.641.516,10	445.530.794.671,56	32.506.846.844,54	7,30
8.1.05	Beban Hibah	75.729.741.680,00	74.126.510.476,00	1.603.231.204,00	2,16
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	55.891,90	225.395,07	(169.703,17)	(75,29)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2.146.182.826.850,00	1.878.134.222.297,63	268.048.604.552,37	14,27
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	124.123.871.481,72	146.936.561.806,23	(22.812.690.324,51)	(15,53)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	124.123.871.481,72	146.936.561.806,23	(22.812.690.324,51)	(15,53)
	JUMLAH BEBAN	2.270.306.698.331,72	2.025.070.784.103,86	245.235.914.227,86	12,11
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.238.498.041.695,08)	(2.021.900.917.764,89)	(216.597.123.930,19)	10,71

Provinsi Sumatera Barat, 31 Desember 2024
Kepala DINAS PENDIDIKAN
Drs. BAFDILIS, MM
NIP.196605301991031005



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	3.210.059.013.102,72	3.012.595.778.661,19
1.1	ASET LANCAR	30.962.697.679,92	11.943.820.248,07
1.1.01	Kas dan Setara Kas	4.555.031.554,62	2.020.511.246,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.138.380,20	45.079.013,14
1.1.10	Penyisihan Piutang	(55.691,90)	(225.395,07)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	1.632.249.685,00	95.291.003,00
1.1.12	Persediaan	24.764.333.752,00	9.783.164.381,00
	JUMLAH ASET LANCAR	30.962.697.679,92	11.943.820.248,07
1.3	ASET TETAP	3.169.601.267.149,54	2.991.883.992.185,44
1.3.01	Tanah	554.261.942.444,34	548.638.994.445,34
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.222.576.882.683,22	1.118.454.048.903,22
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.544.259.679.771,14	2.391.132.539.097,14
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	429.369.359.926,65	386.397.146.013,65
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.125.899.932,89	17.889.389.606,89
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.599.992.497.608,70)	(1.470.628.125.880,80)
	JUMLAH ASET TETAP	3.169.601.267.149,54	2.991.883.992.185,44
1.5	ASET LAINNYA	9.495.048.273,26	8.767.966.227,68
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.371.101.063,50	2.363.651.063,50
1.5.04	Aset Lain-lain	41.728.023.759,12	40.059.203.097,12
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.362.914.848,18)	(2.360.688.633,18)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(32.241.161.701,18)	(31.294.199.299,76)
	JUMLAH ASET LAINNYA	9.495.048.273,26	8.767.966.227,68
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	3.210.059.013.102,72	3.012.595.778.661,19
2	KEWAJIBAN	37.642.853.847,00	9.784.727.294,17
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.642.853.847,00	9.784.727.294,17
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	76.399.215,17
2.1.06	Utang Belanja	37.642.853.847,00	9.708.328.079,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.642.853.847,00	9.784.727.294,17
	JUMLAH KEWAJIBAN	37.642.853.847,00	9.784.727.294,17
3	EKUITAS	3.172.416.159.255,72	3.002.811.051.367,02
3.1	EKUITAS	3.172.416.159.255,72	3.002.811.051.367,02
3.1.01	Ekuitas	790.800.372.086,41	852.805.371.157,02
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	2.381.615.787.169,31	2.150.005.680.210,00
	JUMLAH EKUITAS	3.172.416.159.255,72	3.002.811.051.367,02
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.210.059.013.102,72	3.012.595.778.661,19

Provinsi Sumatera Barat, 31-12-2024
Kepala DINAS PENDIDIKAN


Drs. DARLUS, MM
NIP.196606301991031006

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.002.811.051.367,92	2.867.738.769.489,51
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(2.238.498.041.695,08)	(2.021.900.917.764,89)
RK PPKD	2.381.615.787.169,31	2.150.005.680.218,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEKALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	26.487.362.414,47	6.967.519.441,40
Kas Dana BOS	(466.528.711,00)	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	225.395,00	0,00
Tanah Bangunan Pemukiman/Gedung Tempat Tinggal	290.850.000,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.326.157.999,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Tempat ibadah	5.940.000,00	0,00
Alat Pengangkul	16.080.000,00	0,00
Pompa	40.690.000,00	0,00
Mesin Bor	1.350.000,00	0,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.938.441.573,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.080.000,00	0,00
Peralatan Bangkai Khana Poladum	2.800.000,00	0,00
Alat Kalibrasi	8.800.000,00	0,00
Alat Timbangan/Biaya	5.157.739,00	0,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	15.000.000,00	0,00
Alat Reproduksi (Penggunaan)	2.320.000,00	0,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	186.481.971,00	0,00
Alat Kantor Lainnya	73.142.500,00	0,00
Mebel	241.772.280,00	0,00
Alat Pembersih	47.695.946,00	0,00
Alat Pendingin	71.771.869,00	0,00
Alat Dapur	2.800.000,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49.391.900,00	0,00
Peralatan Studio Video dan Film	38.500.000,00	0,00
Alat-Alat Sani	6.598.000,00	0,00
Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	17.500.000,00	0,00
Alat Kedokteran Umum	9.600.000,00	0,00
Alat Laboratorium Farmasi	1.221.000,00	0,00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	18.879.000,00	0,00
Alat Laboratorium Pertanian	1.032.300,00	0,00
Alat Peraga Praktis Sekolah Bidang Studi-Matematika	300.000.000,00	0,00
Alat Peraga Kejuruan	133.941.406,00	0,00
Alat Peraga Praktis Sekolah Lainnya	558.798.984,00	0,00
Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	12.800.000,00	0,00
Personal Computer	309.284.800,00	0,00
Peralatan Personal Computer	10.500.000,00	0,00
Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	17.149.500,00	0,00
Alat Peraga Percobaan	31.000.000,00	0,00
Peralatan Olahraga Lainnya	20.396.000,00	0,00
Bangunan Gedung Kantor	1.263.775.500,00	0,00
Bangunan Gudang	225.000.000,00	0,00
Bangunan Gedung Instalasi	477.000.000,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.520.000.000,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.109.000.000,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.803.581.900,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	209.811.000,00	0,00
Bangunan Gedung Perumahan/Koperasi/Pasar	60.822.000,00	0,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	15.000.000,00	0,00
Bangunan Terbuka	363.712.000,00	0,00
Bangunan Fasilitas Umum	5.000.000,00	0,00
Bangunan Parkir	25.000.000,00	0,00
Taman	543.000.000,00	0,00
Alat Musik	10.000.000,00	0,00
Barang Kerajinan	800.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkut	(933.333,31)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(5.259.523,86)	0,00

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	(16.071,43)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(102.065.736,10)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(437.499,99)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermotor-Peralatan Bengkel Khusus Pelatam	(46.666,67)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	(146.666,65)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Boran	(945.585,52)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(250.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	(37.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyirip Perengkapan Kantor	(7.874.699,38)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.435.708,33)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rantah Tangga-Mebel	(4.371.286,58)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rantah Tangga-Alat Pembersih	(9.218.355,91)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rantah Tangga-Alat Pendingin	(5.916.197,92)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rantah Tangga-Alat Dapur	(139.999,98)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rantah Tangga-Alat Rantah Tangga Lainnya (Homes Use)	(4.008.063,23)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(911.666,66)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	(109.966,67)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	(291.666,66)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kodokteran-Alat Kodokteran Umum	(1.120.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(20.350,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	(3.459.500,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(189.255,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Matematika	(27.500.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	(14.465.274,01)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(51.723.390,51)	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(12.853.383,44)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(218.750,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(1.786.406,25)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	(516.666,67)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(566.555,54)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(21.332.753,33)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	(1.008.333,33)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(2.961.666,67)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat ibadah	(27.800.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertunjukan	(5.500.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(151.076.757,34)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(1.013.831,67)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(202.743,33)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(25.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(902.373,33)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(8.333,33)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(125.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(1.115.000,00)	0,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	18.520,00	0,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.601.150,00	0,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.824.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembina, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan	300.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	600.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promosi	15.000.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	(19.821,00)	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	303.800,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	324.750,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Riasa	2.286.283,00	0,00
EKUITAS AKHIR	3.172.416.159.255,72	3.002.811.951.367,02

Provinsi Sumatera Barat, 31 Desember 2024
 Kepala DINAS PENDIDIKAN

 Drs. GARCUS, MM
 NIP. 196606301991031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. INFORMASI UMUM

1.1.1 Peraturan Daerah Pembentukan SKPD Dinas Pendidikan

Pembentukan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.1.2 Visi Misi SKPD Dinas Pendidikan

A. VISI

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.

B. MISI

“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter Dan BerkualitasTinggi”

C. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta pengetahuan masyarakat

D. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi Meningkatkan mutu dan daya saing sekolah menengah melalui perbaikan infrastruktur sekolah menengah, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan ketersediaan SMA, SMK dan SLB melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)
 - b. Meningkatkan ketersediaan SMK yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah
 - c. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) secara merata
2. Strategi meningkatkan pendidikan karakter melalui penyehatan lingkungan internal sekolah menengah yang menyenangkan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan budaya lokal dalam proses pembelajaran oleh guru dan warga sekolah menengah, dengan arah

kebijakan menumbuhkan dan meningkatkan budi pekerti melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal Minangkabau.

3. Strategi meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah melalui sistim pendidikan dan pelatihan untuk penguasaan ICT dengan menjalin kerjasama dengan Sekolah Kejuruan dan Mitra di Luar Negeri, dengan arah kebijakan memfasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah termasuk sekolah khusus dan layanan khusus.
4. Strategi meningkatkan kualitas, kuantitas dan relevansi pendidikan, dengan arah kebijakan penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus pada pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti.
5. Strategi meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan menengah dan literasi teknologi informasi, dengan arah kebijakan penyediaan layanan dan kebutuhan operasional pendidikan bagi sekolah menengah.
6. Strategi meningkatkan dan mewujudkan keterserapan lulusan SMA dan SMK di Perguruan Tinggi dan di Dunia Usaha/Industri dan Kewirausahaan, dengan arah kebijakan menjalin kerjasama dengan dunia Usaha/Industri dan Luar Negeri.
7. Strategi meningkatkan efisisensi tata kelola layanan pendidikan melalui penyehatan manajemen organisasi sekolah yang transparan dan akuntabel, dengan arah kebijakan meningkatkan tata kelola layanan pendidikan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 meliputi hal-hal berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Penjelasan Atas Pencapaian Target Kinerja

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Sedangkan tujuan strategis nasional dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana yang dikehendaki, yaitu:

- a. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif dengan Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
- b. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik dengan Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
- c. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter dengan Menguatnya karakter peserta didik

- d. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan dengan meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
- e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan ditempuh dengan meningkatkan pelayanan sehingga mendorong dan memberi efek positif bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang dikelola dinas.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efesiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan pemakaian anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja, dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Penyusunan APBD Tahun 2024, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	75,85	85,09	112,18
			2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	76,40	82,40	107,85
			3. Angka Partisipasi Kasar(APK)SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat (%)	100,00	100,66	100,66
2	Meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Persentase SMA Negeri terakreditasi	94,92	99,58	104,91
			2. Persentase SMK Negeri terakreditasi	88,38	99,14	112,17
			3. Persentase SLB Negeri terakreditasi	62,07	93,33	150,36
3	Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	71,08	71,08	100,00
			2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	59,77	59,77	100,00
4	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	81,48	69,53	85,33
			2. Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	67,43	67,43	100
			3. Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	53,64	76,79	143,16
			4. Jumlah SMK yang terevitalisasi	47	63	134,04
5	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	98,72	99,64	100,93
			2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	56,00	60,93	108,80
			3. Persentase Guru yang bersertifikasi	63,90	64,65	101,17
			4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	92,48	93,08	100,65
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,35 (A)	70,12	87,27
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	87,14	88	100,99

Adapun pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran keuangan tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	Target Dalam Dok Anggaran		Realisasi		Capaian Kinerja (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	DINAS PENDIDIKAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	dokumen	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	6	dokumen	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	3	laporan	100.00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	4	laporan	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,005	orang/bulan	13,426	orang/bulan	103.24
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	1	dokumen	100.00
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100.00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	laporan	100.00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	laporan	1	laporan	100.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100.00
12	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	1	laporan	100.00
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	1	laporan	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	paket	2	paket	66.67
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101	orang	90	orang	89.11

16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3,774	orang	3,316	orang	87.86
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	paket	1	paket	100.00
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	paket	1	paket	100.00
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	paket	1	paket	100.00
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	paket	4	paket	100.00
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	1	paket	100.00
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	dokumen	1	dokumen	100.00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	1	laporan	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	unit	9	unit	100.00
25	Pengadaan Mebel	2	paket	2	paket	100.00
26	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	-	unit	-
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167	unit	166	unit	99.40
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	1	unit	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	laporan	100.00
30	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	laporan	1	laporan	100.00
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	laporan	1	laporan	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	unit	8	unit	100.00
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	unit	1	unit	100.00
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	unit	2	unit	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						
35	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3	unit	3	unit	100.00

36	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	9	ruang	9	ruang	100.00
37	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15	ruang	15	ruang	100.00
38	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3	ruang	3	ruang	100.00
39	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	7	ruang	7	ruang	100.00
40	Pembangunan Asrama Sekolah	1	unit	1	unit	100.00
41	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	72	unit	72	unit	100.00
42	Pembangunan Kantin Sekolah	2	unit	2	unit	100.00
43	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14	ruang	14	ruang	100.00
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11	ruang	11	ruang	100.00
45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	1	ruang	1	ruang	100.00
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	1	ruang	1	ruang	100.00
47	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	3	ruang	3	ruang	100.00
48	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	2	ruang	2	ruang	100.00
49	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	3	ruang	3	ruang	100.00
50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5	ruang	5	ruang	100.00
51	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4	ruang	4	ruang	100.00
52	Pengadaan Mebel Sekolah	12	paket	12	paket	100.00
53	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	137,974	paket	137,974	paket	100.00
54	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9	paket	8	paket	88.89
55	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	2,018	peserta didik	2,008	peserta didik	99.50
56	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	32,878	peserta didik	24,468	peserta didik	74.42
57	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	236	satuan pendidikan	236	satuan pendidikan	100.00
58	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	236	orang	236	orang	100.00
59	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	dokumen	1	dokumen	100.00
60	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1	unit	1	unit	100.00
61	Rehabilitasi sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	15	unit	15	unit	100.00
62	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	2	unit	2	unit	100.00

63	Pembangunan Ruang Laboratorium	64	ruang	64	ruang	100.00
64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	26	ruang	26	ruang	100.00
65	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	236	satuan pendidikan	236	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
66	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2	unit	2	unit	100.00
67	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	ruang	-	ruang	-
68	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	11	ruang	7	ruang	63.64
69	Pembangunan Ruang Laboratorium	30	ruang	13	ruang	43.33
70	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	11	ruang	11	ruang	100.00
71	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2	ruang	3	ruang	150.00
72	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	24	unit	17	unit	70.83
73	Pembangunan Kantin Sekolah	1	unit	-	unit	-
74	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5	ruang	5	ruang	100.00
75	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	3	ruang	4	ruang	133.33
76	Pengadaan Mebel Sekolah	50	paket	1	paket	2.00
77	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6,308	paket	6,308	paket	100.00
78	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	29	paket	31	paket	106.90
79	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	5,384	peserta didik	5,384	peserta didik	100.00
80	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	28	satuan pendidikan	28	satuan pendidikan	100.00
81	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	111	satuan pendidikan	111	satuan pendidikan	100.00
82	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	240	orang	240	orang	100.00
83	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	dokumen	4	dokumen	100.00
84	Rehabilitasi sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	unit	4	unit	100.00
85	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4	ruang	1	ruang	25.00
86	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	1	ruang	1	ruang	100.00
87	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	8	ruang	9	ruang	112.50
88	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	12	satuan pendidikan	12	satuan pendidikan	100.00
89	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	2	ruang	2	ruang	100.00

	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
90	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1	unit	1	unit	100.00
91	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6	ruang	6	ruang	100.00
92	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4	ruang	4	ruang	100.00
93	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2	ruang	2	ruang	100.00
94	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	2	unit	2	unit	100.00
95	Pembangunan Kantin Sekolah	4	unit	4	unit	100.00
96	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	3	ruang	3	ruang	100.00
97	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1	ruang	1	ruang	100.00
98	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1	ruang	1	ruang	100.00
99	Pengadaan Mebel Sekolah	347	paket	347	paket	100.00
100	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	443	paket	443	paket	100.00
101	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	42	paket	42	paket	100.00
102	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	494	peserta didik	346	peserta didik	70.04
103	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	29	satuan pendidikan	29	satuan pendidikan	100.00
104	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	29	satuan pendidikan	29	satuan pendidikan	100.00
105	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	344	orang	344	orang	100.00
106	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29	dokumen	29	dokumen	100.00
107	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2	ruang	2	ruang	100.00
108	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	20	unit	20	unit	100.00
109	Pembangunan Ruang Kelas Baru	18	ruang	18	ruang	100.00
110	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	29	satuan pendidikan	29	satuan pendidikan	100.00
111	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	1	ruang	1	ruang	100.00
112	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	12	ruang	12	ruang	100.00
113	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	14	ruang	14	ruang	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						
114	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1,650	buku	-	buku	-
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi						
115	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	dokumen	1	dokumen	100.00
116	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	laporan	1	laporan	100.00

	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					
117	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	100.00
118	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	100.00
	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					
119	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	100.00
120	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	100.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
	Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
121	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	30	orang	30	orang	100.00
122	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	38	peserta didik	38	peserta didik	100.00
	UPTD BALTEKOMDIK					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
123	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15	paket	15	paket	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
124	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	paket	5	paket	100.00
125	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	paket	2	paket	100.00
126	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	laporan	8	laporan	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
127	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7	laporan	7	laporan	100.00
128	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
129	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	1	unit	100.00
	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
130	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43	paket	43	paket	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					

131	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	12	paket	100.00
132	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	12	paket	100.00
133	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	paket	12	paket	100.00
134	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
135	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100.00
136	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	laporan	100.00
137	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
138	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	unit	12	unit	100.00
139	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	unit	12	unit	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						
140	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	8	satuan pendidikan	8	satuan pendidikan	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						
141	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	8	satuan pendidikan	8	satuan pendidikan	100.00
Pengelolaan Pendidikan Khusus						
142	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	8	satuan pendidikan	8	satuan pendidikan	100.00
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
143	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30	paket	30	paket	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
144	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	12	paket	100.00
145	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	12	paket	100.00
146	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	paket	12	paket	100.00
147	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100.00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
148	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100.00
149	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	laporan	100.00
150	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
151	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
152	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	unit	12	unit	100.00
153	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	unit	12	unit	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
154	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	26	satuan pendidikan	26	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
155	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9	satuan pendidikan	8	satuan pendidikan	88.89
	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
156	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2	satuan pendidikan	2	satuan pendidikan	100.00
	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK, KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
157	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28	paket	28	paket	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
158	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	12	paket	100.00
159	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	12	paket	100.00
160	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	paket	12	paket	100.00
161	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
162	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100.00
163	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	laporan	100.00

164	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
165	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
166	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	unit	12	unit	100.00
167	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	unit	12	unit	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
168	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	34	satuan pendidikan	34	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
169	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	17	satuan pendidikan	17	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
170	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5	satuan pendidikan	5	satuan pendidikan	100.00
	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
171	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35	paket	35	paket	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
172	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	12	paket	100.00
173	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	12	paket	100.00
174	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	paket	12	paket	100.00
175	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
176	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100.00
177	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	laporan	100.00
178	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

179	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	unit	12	unit	100.00
180	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	unit	12	unit	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
181	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	36	satuan pendidikan	36	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
182	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	15	satuan pendidikan	15	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
183	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4	satuan pendidikan	4	satuan pendidikan	100.00
	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
184	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30	paket	30	paket	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
185	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	12	paket	100.00
186	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	12	paket	100.00
187	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	paket	12	paket	100.00
188	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
189	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100.00
190	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	laporan	100.00
191	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
192	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	12	laporan	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
193	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	1	unit	100.00
194	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	unit	1	unit	100.00

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
195	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	32	satuan pendidikan	32	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
196	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	18	satuan pendidikan	32	satuan pendidikan	177.78
	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
197	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5	satuan pendidikan	5	satuan pendidikan	100.00
	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
198	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30	paket	30	paket	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
199	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	paket	1	paket	100.00
200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	paket	2	paket	100.00
201	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	paket	12	paket	100.00
202	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	1	laporan	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
203	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	laporan	100.00
204	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	laporan	1	laporan	100.00
205	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	laporan	1	laporan	100.00
206	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	laporan	1	laporan	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
207	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	1	unit	100.00
208	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	unit	1	unit	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
209	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	25	satuan pendidikan	25	satuan pendidikan	100.00

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
210	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	15	satuan pendidikan	15	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
211	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3	satuan pendidikan	3	satuan pendidikan	100.00
	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
212	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17	paket	17	paket	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
213	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	paket	1	paket	100.00
214	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	12	paket	100.00
215	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	1	paket	100.00
216	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	1	laporan	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
217	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	laporan	100.00
218	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	laporan	1	laporan	100.00
219	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	laporan	1	laporan	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
220	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	1	unit	100.00
221	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	unit	1	unit	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
222	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	25	satuan pendidikan	25	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
223	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9	satuan pendidikan	9	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus					

224	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4	satuan pendidikan	4	satuan pendidikan	100.00
	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
225	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11	paket	11	paket	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
226	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	paket	1	paket	100.00
227	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	12	paket	100.00
228	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	1	paket	100.00
229	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	1	laporan	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
230	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	laporan	100.00
231	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	laporan	1	laporan	100.00
232	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	laporan	1	laporan	100.00
233	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	laporan	1	laporan	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
234	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	unit	1	unit	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
235	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	11	satuan pendidikan	11	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
236	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3	satuan pendidikan	3	satuan pendidikan	100.00
	Pengelolaan BLUD SMK se-Sumatera Barat					
	SMKN 1 PARIAMAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
237	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00

	SMKN 2 PARIAMAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
238	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 3 PARIAMAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
239	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 BUKITTINGGI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
240	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 2 BUKITTINGGI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
241	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 PADANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
242	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 2 PADANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
243	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00

	SMKN 4 PADANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
244	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 6 PADANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
245	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 8 PADANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
246	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 9 PADANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
247	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMK PP NEGERI PADANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
248	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 PAYAKUMBUH					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
249	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00

	SMKN 2 PAYAKUMBUH					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
250	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 2 SAWAHLUNTO					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
251	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 AMPEK ANGKEK					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
252	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 2 LUBUK BASUNG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
253	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 KOTO BARU					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
254	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
255	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00

	SMKN 1 GUGUK					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
256	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 SULIKI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
257	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
258	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
259	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 LUBUK SIKAPING					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
260	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 PASAMAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
261	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00

	SMKN 1 SIJUNJUNG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
262	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 PAINAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
263	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00
	SMKN 1 RANAH PESISIR					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Peningkatan Pelayanan BLUD					
264	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit	1	unit	100.00

2.4. PENJELASAN ATAS PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.4.1. Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK)

Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung program atau proyek pembangunan yang memiliki urgensi tinggi dan tidak dapat dibiayai oleh anggaran rutin. Dana BKK diberikan dalam bentuk hibah atau bantuan keuangan yang langsung digunakan untuk membiayai kegiatan di Bidang Pendidikan. Bantuan ini ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya mendesak atau untuk daerah yang memiliki kebutuhan khusus, terutama yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan sistem pendidikan.

Adapun daerah yang memberikan Dana BKK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan pendidikan adalah Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman.

2.4.1.1 Dana BKK Kota Bukittinggi

Berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-47-2024 Tanggal 26 Januari 2024 Tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sebagai Penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor.400.9.14.5/170/Disdikbud/2024 dan Nomor 120-004/GSB-2024 Tanggal 26 Maret 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus bagi SMAN, SMKN dan SLBN Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Dana Bantuan Khusus sejumlah Rp. 9.597.200.000,- (sembilan miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Adapun Realisasi Penggunaan Dana BKK Kota Bukittinggi dibawah naungan Cabang Dinas Wilayah I adalah sebagai berikut:

SATUAN PENDIDIKAN	PAGU PERGESERAN	SILPA 2023	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	SISA DANA
	9,597,200,000	880,006,325	10,477,206,325	9,768,474,754	708,731,571
SMAN 1 Bukittinggi	1,663,760,000	159,610,412	1,823,370,412	1,747,987,577	75,382,835
SMAN 2 Bukittinggi	1,410,500,000	242,281,396	1,652,781,396	1,450,680,764	202,100,632
SMAN 3 Bukittinggi	1,485,400,000	116,463,601	1,601,863,601	1,449,166,002	152,697,599
SMAN 4 Bukittinggi	1,251,040,000	133,307,700	1,384,347,700	1,312,700,674	71,647,026
SMAN 5 Bukittinggi	1,289,280,000	121,911,680	1,411,191,680	1,293,415,376	117,776,304
SMKN 1 Bukittinggi	1,381,820,000	54,351,069	1,436,171,069	1,381,295,730	54,875,339
SMKN 2 Bukittinggi	965,000,000	25,518,867	990,518,867	963,256,150	27,262,717
SLBN 1 Bukittinggi	150,400,000	26,561,600	176,961,600	169,972,482	6,989,118

2.4.1.2 Dana BKK Kota Pariaman

Berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 37/801/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Tentang Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Kota Pariaman Kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor.120-019/PKS/GSB-2024 dan Nomor 004/PKS/PEM/XI/2024 Tanggal 18 November 2024 Tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bagi SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Dana Bantuan Khusus sejumlah Rp. 3.235.680.000,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Adapun Realisasi Penggunaan Dana BKK Kota Pariaman dibawah naungan Cabang Dinas Wilayah II adalah sebagai berikut:

SATUAN PENDIDIKAN	PAGU PERGESERAN	SILPA 2023	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	SISA DANA
	3,235,680,000	244,968,245	3,480,648,245	3,408,951,072	71,697,173
SMAN 1 PARIAMAN	537,120,000	7,374,789	544,494,789	531,036,548	13,458,241
SMAN 2 PARIAMAN	541,440,000	4,373,793	545,813,793	539,208,928	6,604,865
SMAN 3 PARIAMAN	429,120,000	506,255	429,626,255	426,806,376	2,819,879
SMAN 4 PARIAMAN	319,680,000	1,734,802	321,414,802	318,624,100	2,790,702
SMAN 5 PARIAMAN	242,640,000	5,041,020	247,681,020	245,772,688	1,908,332
SMAN 6 PARIAMAN	150,480,000	5,268	150,485,268	149,127,769	1,357,499
SMKN 1 PARIAMAN	252,000,000	2,107,849	254,107,849	243,415,000	10,692,849
SMKN 2 PARIAMAN	224,640,000	32,270,950	256,910,950	241,306,155	15,604,795
SMKN 3 PARIAMAN	389,520,000	188,971,045	578,491,045	568,565,208	9,925,837
SMKN 4 PARIAMAN	73,440,000	2,566,174	76,006,174	75,000,000	1,006,174
SLBN 1 PARIAMAN	55,440,000	16,300	55,456,300	50,014,000	5,442,300
SLBN 2 PARIAMAN	20,160,000	-	20,160,000	20,074,300	85,700

2.4.1.3 Dana BKK Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 37/801/20188.45/228/KPTS-BPT-2023 Tanggal 30 November 2023 Tentang Peruntukan dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sumatera dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Nomor.120-002/PKS/GSB-2024 dan Nomor 139/02/KSDD/PKS/Pem-2024 Tanggal 19 Februari 2024 Tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bagi SMAN, SMKN dan SLBN Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024 menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Dana Bantuan Khusus sejumlah Rp. 5.604.000.000,- (lima miliar enam ratus empat juta rupiah).

Adapun Realisasi Penggunaan Dana BKK Kota Pariaman dibawah naungan Cabang Dinas Wilayah II adalah sebagai berikut:

SATUAN PENDIDIKAN	PAGU PERGESERAN	SILPA 2023	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	SISA DANA
	5,604,000,000	1,195,199,016	6,799,199,016	5,867,522,718	931,676,298
SMAN 1 Sijunjung	481,800,000	115,564,931	597,364,931	371,200,810	226,164,121
SMAN 2 Sijunjung	447,000,000	33,252,954	480,252,954	470,078,905	10,174,049
SMAN 3 Sijunjung	171,600,000	21,112,355	192,712,355	188,945,450	3,766,905
SMAN 4 Sijunjung	140,400,000	40,529,896	180,929,896	133,285,297	47,644,599
SMAN 5 Sijunjung	285,600,000	74,247,273	359,847,273	290,782,573	69,064,700
SMAN 6 Sijunjung	186,600,000	85,890,110	272,490,110	237,474,100	35,016,010
SMAN 7 Sijunjung	335,400,000	142,697,800	478,097,800	400,208,900	77,888,900
SMAN 8 Sijunjung	91,200,000	20,328,000	111,528,000	108,164,800	3,363,200
SMAN 9 Sijunjung	329,400,000	47,571,490	376,971,490	310,993,496	65,977,994
SMAN 10 Sijunjung	307,800,000	101,171,830	408,971,830	311,774,044	97,197,786
SMAN 11 Sijunjung	99,600,000	41,180,051	140,780,051	133,012,196	7,767,855
SMAN 12 Sijunjung	223,200,000	12,166,622	235,366,622	235,356,622	10,000
SMAN 13 Sijunjung	76,800,000	35,349,000	112,149,000	112,149,000	-
SMKN 1 Sijunjung	725,400,000	137,651,578	863,051,578	794,300,438	68,751,140
SMKN 2 Sijunjung	473,400,000	86,299,232	559,699,232	492,378,100	67,321,132
SMKN 3 Sijunjung	334,200,000	53,003,746	387,203,746	301,578,200	85,625,546
SMKN 4 Sijunjung	292,800,000	56,129,000	348,929,000	335,762,539	13,166,461
SMKN 5 Sijunjung	250,800,000	32,908,250	283,708,250	258,090,100	25,618,150
SMKN 6 Sijunjung	47,400,000	4,487,728	51,887,728	50,232,228	1,655,500
SMKN 7 Sijunjung	158,400,000	22,691,320	181,091,320	175,754,520	5,336,800
SMKN 8 Sijunjung	55,800,000	17,790,000	73,590,000	54,840,000	18,750,000
SLBN 1 Muaro Sijunjung	52,800,000	8,755,350	61,555,350	59,465,100	2,090,250
SLBN 1 Kamang Baru	36,600,000	4,420,500	41,020,500	41,695,300	(674,800)

2.4.1.4 Dana BKK Kabupaten Pasaman

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/334/BUP-PAS/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sumatera dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Nomor.120-005/GSB-2024 dan Nomor 181/04/BUP-PDS/2024 Tanggal 26 Maret 2024 Tentang Program Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMAN, SMKN dan SLBN Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024 menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Dana Bantuan Khusus sejumlah Rp. 8.559.200.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus rupiah).

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki utang Dana BKK kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp. 218.550.000,00**. Hal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama No. 120-004/PKS/GSB-2023 dan No. 134.5/2/PKS/PEM-2023 tanggal 21 Februari 2023 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman perihal pemberian bantuan dana BKK Pendidikan untuk SMAN, SMKN dan SLBN Kabupaten Pasaman, bahwa nilai dana BKK sesuai PKS adalah sebesar Rp. 8.312.800.000,- (delapan milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang disalurkan dari Kabupaten Pasaman baru sebesar Rp.8.094.250.000,00 (delapan milyar sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal tersebut disebabkan terdapat pemotongan anggaran dana BKK pada DPA Awal Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar TA 2023 namun telah ditambahkan kembali pada APBD-Perubahan 2023 dan belum dimintakan penambahan kekurangannya ke Kabupaten Pasaman, sehingga saat ini terjadi selisih antara APBD Provinsi dengan Penyaluran dana BKK sebesar Rp. 218.550.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun Realisasi Dana BKK Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN PENDIDIKAN	PAGU PERGESERAN	SILPA 2023	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	SISA DANA
	8,557,658,000	465,379,396	9,023,037,396	8,385,873,077	637,164,319
SMAN 1 Bonjol	631,400,000	44,384,073	675,784,073	650,959,821	24,824,252
SMAN 1 Dua Koto	457,100,000	11,915,900	469,015,900	455,999,900	13,016,000
SMAN 1 Lubuk Sikaping	721,700,000	50,175,892	771,875,892	644,901,816	126,974,076
SMAN 1 Mapat Tunggul	99,400,000	8,789,920	108,189,920	95,698,504	12,491,416
SMAN 1 Mapat Tunggul Selatan	94,500,000	3,480,850	97,980,850	79,288,200	18,692,650
SMAN 1 Padang Gelugur	756,000,000	12,305,120	768,305,120	761,260,225	7,044,895
SMAN 1 Panti	485,658,000	5,967,740	491,625,740	474,077,000	17,548,740
SMAN 1 Rao	720,300,000	15,080,000	735,380,000	717,480,400	17,899,600
SMAN 1 Rao utara	145,600,000	5,770,250	151,370,250	148,152,416	3,217,834
SMAN 1 Tigo nagari	532,000,000	33,122,200	565,122,200	478,060,728	87,061,472
SMAN 2 Lubuk Sikaping	486,500,000	14,619,456	501,119,456	450,223,600	50,895,856
SMAN 3 Sumatera Barat	193,200,000	12,393,886	205,593,886	204,277,407	1,316,479
SMKN 1 Bonjol	560,000,000	139,954,184	699,954,184	617,855,654	82,098,530
SMKN 1 Dua Koto	244,000,000	2,130,000	246,130,000	235,471,000	10,659,000
SMKN 1 Lubuk Sikaping	1,122,400,000	67,065,004	1,189,465,004	1,149,372,031	40,092,973
SMKN 1 Padang Gelugur	338,400,000	7,800,000	346,200,000	341,209,000	4,991,000
SMKN 1 Rao Selatan	714,400,000	16,208,720	730,608,720	650,354,500	80,254,220
SMKN 1 Simpang Alahan Mati	131,200,000	12,357,201	143,557,201	109,671,875	33,885,326
SLBN 1 Lubuk Sikaping	62,300,000	750,000	63,050,000	62,990,000	60,000
SLBN 1 Panti	61,600,000	1,109,000	62,709,000	58,569,000	4,140,000
	26,994,538,000	2,785,552,982	29,780,090,982	27,430,821,621	2,349,269,361

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dalam Tahun Anggaran 2024, per Desember 2024, OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar **Rp. 36.362.357.537,00** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Belanja Operasi **Rp. 2.190.837.411.628,00**

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD per Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 per Desember 2024 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 22.238.020.229,65**

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat Total pendapatan adalah **87,36%** dari anggaran yang ada.

Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	LEBIH/KURANG
B	BELANJA DAERAH	2,523,027,437,087.00	2,410,380,936,204.10	95.54	112,646,500,882.90
I	BELANJA OPERASI	2,190,837,411,628.00	2,133,084,893,265.10	97.36	57,752,518,362.90
1	Belanja Pegawai	1,626,736,829,717.00	1,592,002,002,278.00	97.86	34,734,827,439.00
2	Belanja Barang dan Jasa	487,934,231,911.00	465,353,149,307.10	95.37	22,581,082,603.90
3	Belanja Hibah	76,166,350,000.00	75,729,741,680.00	99.43	436,608,320.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,190,837,411,628.00	2,133,084,893,265.10	97.36	57,752,518,362.90
II	BELANJA MODAL	332,190,025,459.00	277,296,042,939.00	83.48	54,893,982,520.00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126,412,225,761.00	99,093,872,050.00	78.39	27,318,353,711.00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162,502,995,731.00	134,567,124,579.00	82.81	27,935,871,152.00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43,274,803,967.00	43,635,046,310.00	100.83	(360,242,343.00)

Seluruh realisasi **Rp. 2,410.380.936.204,10 (95,54%)**

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA OPD Dinas Pendidikan Tahun 2024 terdiri dari 6 Program, 103 Kegiatan dan 261 Sub Kegiatan. Capaian-capaian dari kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi		Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	%	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2,523,027,437,087	2,410,380,936,204	95.54	112,646,500,883
	01.00	DINAS PENDIDIKAN	2,383,201,268,095	2,286,363,761,815	95.94	96,837,506,280
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,654,655,096,845	1,615,838,631,055	97.65	38,816,465,790
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,630,351,000	1,301,401,472	79.82	328,949,528
1	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	701,919,400	663,443,200	94.52	38,476,200
2	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50,000,200	39,645,000	79.29	10,355,200
3	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	292,106,400	247,613,750	84.77	44,492,650
4	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	212,898,100	115,982,400	54.48	96,915,700
5	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	373,426,900	234,717,122	62.85	138,709,778
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,628,841,496,485	1,594,001,788,790	97.86	34,839,707,695
6	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,625,078,939,717	1,590,344,112,278	97.86	34,734,827,439
7	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,111,783,868	2,109,244,312	99.88	2,539,556
8	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134,725,000	89,392,200	66.35	45,332,800

9	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	203,000,000	150,386,000	74.08	52,614,000
10	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,313,047,900	1,308,654,000	99.67	4,393,900
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,653,722,700	5,431,305,579	96.07	222,417,121
11	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,143,742,000	5,025,907,550	97.71	117,834,450
12	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	403,405,700	340,392,929	84.38	63,012,771
13	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106,575,000	65,005,100	60.99	41,569,900
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,638,353,750	1,625,708,839	44.68	2,012,644,911
14	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2,094,868,950	268,185,300	12.80	1,826,683,650
15	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67,500,000	60,694,999	89.92	6,805,001
16	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,475,984,800	1,296,828,540	87.86	179,156,260
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,726,073,759	6,144,598,381	91.35	581,475,378
17	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41,625,500	41,357,000	99.35	268,500
18	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,293,200,540	1,210,211,060	93.58	82,989,480
19	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	248,517,500	245,870,000	98.93	2,647,500
20	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,560,207,100	3,262,243,900	91.63	297,963,200
21	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	234,466,700	227,695,700	97.11	6,771,000
22	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76,018,400	75,624,000	99.48	394,400
23	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,272,038,019	1,081,596,721	85.03	190,441,298
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,790,869,440	3,141,260,555	82.86	649,608,885
24	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,239,000,000	2,801,313,355	86.49	437,686,645
25	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	142,763,800	140,700,000	98.55	2,063,800
26	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000	-	-	100,000,000
27	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253,352,000	144,347,200	56.97	109,004,800
28	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55,753,640	54,900,000	98.47	853,640
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,348,660,790	2,252,082,527	95.89	96,578,263
29	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56,049,300	55,534,000	99.08	515,300
30	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	844,620,000	776,081,687	91.89	68,538,313
31	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,447,991,490	1,420,466,840	98.10	27,524,650
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,025,568,921	1,940,484,912	95.80	85,084,009
32	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344,592,500	318,168,950	92.33	26,423,550

33	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181,052,981	177,338,000	97.95	3,714,981
34	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,499,923,440	1,444,977,962	96.34	54,945,478
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	725,525,046,050	667,874,375,705	92.05	57,650,670,345
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	369,787,689,311	353,459,718,536	95.58	16,327,970,775
35	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,000,000,000	5,673,108,180	94.55	326,891,820
36	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3,152,590,000	3,059,589,189	97.05	93,000,811
37	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2,520,192,000	2,340,251,271	92.86	179,940,729
38	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	803,949,000	750,107,999	93.30	53,841,001
39	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3,215,400,000	2,295,904,689	71.40	919,495,311
40	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	200,000,000	194,423,677	97.21	5,576,323
41	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	15,160,709,440	12,799,329,006	84.42	2,361,380,434
42	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah	200,170,000	74,385,800	37.16	125,784,200
43	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15,656,133,000	14,945,320,377	95.46	710,812,623
44	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2,405,867,000	2,320,998,510	96.47	84,868,490
45	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	121,000,000	114,906,973	94.96	6,093,027
46	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	323,376,000	317,647,200	98.23	5,728,800
47	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	720,918,000	682,995,560	94.74	37,922,440
48	1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	357,013,000	315,449,400	88.36	41,563,600
49	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	947,007,000	911,915,810	96.29	35,091,190
50	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	417,602,000	392,809,630	94.06	24,792,370
51	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,005,419,000	983,245,780	97.79	22,173,220
52	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	9,034,000,000	6,511,319,817	72.08	2,522,680,183
53	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7,544,000,000	7,307,803,900	96.87	236,196,100
54	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8,383,837,057	7,136,583,243	85.12	1,247,253,814
55	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5,760,000,000	4,481,642,515	77.81	1,278,357,485
56	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	10,520,000,000	10,028,399,667	95.33	491,600,333
57	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	241,164,357,037	239,589,733,512	99.35	1,574,623,525
58	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	250,000,000	218,525,754	87.41	31,474,246
59	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,065,775,000	1,002,581,444	94.07	63,193,556
60	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	120,000,000	115,690,300	96.41	4,309,700
61	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,437,786,000	1,301,284,182	90.51	136,501,818
62	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	400,000,000	224,663,913	56.17	175,336,087
63	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	17,150,602,985	14,254,699,504	83.11	2,895,903,481
64	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,553,281,571	7,946,287,513	92.90	606,994,058

65	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5,196,704,221	5,168,114,221	99.45	28,590,000
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	284,309,593,679	245,519,738,388	86.36	38,789,855,291
66	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,844,534,139	1,371,329,450	20.04	5,473,204,689
67	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	35,530,200	35,530,200	100.00	-
68	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	14,012,439,000	11,848,766,470	84.56	2,163,672,530
69	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	11,668,514,000	8,065,848,558	69.12	3,602,665,442
70	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,564,966,000	1,128,377,521	72.10	436,588,479
71	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	831,497,000	528,377,256	63.55	303,119,744
72	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,256,274,575	3,964,732,432	75.43	1,291,542,143
73	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah	13,306,400	10,139,000	76.20	3,167,400
74	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2,295,593,500	2,125,636,281	92.60	169,957,219
75	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1,766,910,000	1,703,990,351	96.44	62,919,649
76	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	1,598,533,471	1,531,826,400	95.83	66,707,071
77	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5,750,000,000	5,107,060,600	88.82	642,939,400
78	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	59,803,177,990	39,170,114,478	65.50	20,633,063,512
79	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	3,195,867,100	2,909,688,316	91.05	286,178,784
80	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	250,000,000	237,145,000	94.86	12,855,000
81	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	142,298,469,784	140,843,373,144	98.98	1,455,096,640
82	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	250,000,000	218,043,436	87.22	31,956,564
83	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10,810,000,000	9,942,037,288	91.97	867,962,712
84	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	382,876,400	348,293,200	90.97	34,583,200
85	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,643,312,000	1,247,418,067	75.91	395,893,933
86	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	200,000,000	189,712,249	94.86	10,287,751
87	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	6,094,866,000	5,696,269,434	93.46	398,596,566
88	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7,230,080,120	6,956,398,963	96.21	273,681,157
89	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	512,846,000	339,630,294	66.22	173,215,706
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	71,427,763,060	68,894,918,781	96.45	2,532,844,279
90	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2,600,000,000	1,808,892,650	69.57	791,107,350
91	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,959,987,314	1,843,161,900	94.04	116,825,414
92	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	912,736,850	865,936,000	94.87	46,800,850
93	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	527,040,297	505,529,300	95.92	21,510,997
94	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	365,242,298	151,810,000	41.56	213,432,298
95	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	1,750,648,348	1,627,285,600	92.95	123,362,748
96	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	558,322,698	530,268,000	94.98	28,054,698
97	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	230,072,797	223,721,000	97.24	6,351,797

98	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	204,685,580	198,251,000	96.86	6,434,580
99	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	1,698,542,950	1,642,291,070	96.69	56,251,880
100	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400,000,000	384,395,000	96.10	15,605,000
101	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3,009,597,000	2,772,839,009	92.13	236,757,991
102	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	533,950,696	504,410,092	94.47	29,540,604
103	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	300,000,000	295,678,000	98.56	4,322,000
104	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	42,190,543,179	41,908,636,760	99.33	281,906,419
105	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	250,000,000	169,181,000	67.67	80,819,000
106	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,000,000,000	963,452,000	96.35	36,548,000
107	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	192,412,280	189,027,000	98.24	3,385,280
108	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,347,830,505	2,285,091,000	97.33	62,739,505
109	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4,134,305,065	3,937,884,800	95.25	196,420,265
110	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	446,710,000	441,710,000	98.88	5,000,000
111	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	555,239,691	544,703,500	98.10	10,536,191
112	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	2,677,629,765	2,585,155,800	96.55	92,473,965
113	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2,582,265,747	2,515,608,300	97.42	66,657,447
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100,000,000	-	-	100,000,000
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100,000,000	-	-	100,000,000
114	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100,000,000	-	-	100,000,000
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2,621,125,200	2,445,971,155	93.32	175,154,045
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2,621,125,200	2,445,971,155	93.32	175,154,045
115	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	304,391,950	294,691,950	96.81	9,700,000
116	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2,316,733,250	2,151,279,205	92.86	165,454,045
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	200,000,000	113,955,900	56.98	86,044,100
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,000,000	54,300,000	54.30	45,700,000
117	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000	20,425,000	40.85	29,575,000
118	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000	33,875,000	67.75	16,125,000
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,000,000	59,655,900	59.66	40,344,100

119	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000	23,840,000	47.68	26,160,000
120	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000	35,815,900	71.63	14,184,100
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100,000,000	90,828,000	90.83	9,172,000
	1.01.06.1.01	Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,000,000	90,828,000	90.83	9,172,000
121	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	50,000,000	44,201,000	88.40	5,799,000
122	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	50,000,000	46,627,000	93.25	3,373,000
	01.00	UPTD BALTEKOMDIK	1,147,622,020	1,112,079,590	96.90	35,542,430
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,147,622,020	1,112,079,590	96.90	35,542,430
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,500,000	13,410,000	99.33	90,000
123	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13,500,000	13,410,000	99.33	90,000
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782,095,651	760,354,321	97.22	21,741,330
124	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101,891,800	101,188,200	99.31	703,600
125	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,790,900	11,808,800	79.84	2,982,100
126	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665,412,951	647,357,321	97.29	18,055,630
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334,175,369	320,509,019	95.91	13,666,350
127	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	112,200,000	112,166,150	99.97	33,850
128	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221,975,369	208,342,869	93.86	13,632,500
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,851,000	17,806,250	99.75	44,750
129	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17,851,000	17,806,250	99.75	44,750
	01.00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)	20,733,817,925	19,698,459,386	95.01	1,035,358,539
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4,845,516,600	4,674,439,641	96.47	171,076,959
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,000,000	24,000,000	100.00	-
130	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24,000,000	24,000,000	100.00	-
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,535,171,836	2,476,343,026	97.68	58,828,810
131	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,932,350	12,663,600	97.92	268,750
132	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,285,950,200	2,245,795,940	98.24	40,154,260
133	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,773,900	14,721,000	99.64	52,900
134	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,515,386	203,162,486	91.71	18,352,900
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,258,034,764	2,147,778,185	95.12	110,256,579

135	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,390,000	6,390,000	100.00	-
136	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	23,773,500	15,209,980	63.98	8,563,520
137	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,227,871,264	2,126,178,205	95.44	101,693,059
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,310,000	26,318,430	92.97	1,991,570
138	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,950,000	14,958,430	88.25	1,991,570
139	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,360,000	11,360,000	100.00	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15,888,301,325	15,024,019,745	94.56	864,281,580
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10,522,954,789	9,844,070,948	93.55	678,883,841
140	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	10,522,954,789	9,844,070,948	93.55	678,883,841
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4,857,144,936	4,680,066,315	96.35	177,078,621
141	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4,857,144,936	4,680,066,315	96.35	177,078,621
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	508,201,600	499,882,482	98.36	8,319,118
142	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	508,201,600	499,882,482	98.36	8,319,118
	01.00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)	12,285,761,897	10,681,370,877	86.94	1,604,391,020
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	588,777,657	552,019,805	93.76	36,757,852
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,000,000	20,944,000	99.73	56,000
143	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21,000,000	20,944,000	99.73	56,000
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353,688,200	334,129,262	94.47	19,558,938
144	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,812,300	22,781,000	99.86	31,300
145	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121,757,400	121,515,000	99.80	242,400
146	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,520,000	21,518,000	99.99	2,000
147	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187,598,500	168,315,262	89.72	19,283,238
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190,039,457	173,859,743	91.49	16,179,714
148	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	100.00	-
149	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	32,358,050	17,855,525	55.18	14,502,525
150	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000	35,000,000	100.00	-
151	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118,681,407	117,004,218	98.59	1,677,189
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,050,000	23,086,800	96.00	963,200
152	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,950,000	15,986,800	94.32	963,200
153	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,100,000	7,100,000	100.00	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	11,696,984,240	10,129,351,072	86.60	1,567,633,168

	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7,718,250,062	6,809,056,409	88.22	909,193,653
154	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7,718,250,062	6,809,056,409	88.22	909,193,653
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3,642,459,278	3,016,326,363	82.81	626,132,915
155	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3,642,459,278	3,016,326,363	82.81	626,132,915
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	336,274,900	303,968,300	90.39	32,306,600
156	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	336,274,900	303,968,300	90.39	32,306,600
	01.00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK, KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)	7,273,858,014	6,744,453,736	92.72	529,404,278
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3,577,308,014	3,417,933,736	95.54	159,374,278
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16,500,000	16,500,000	100.00	-
157	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16,500,000	16,500,000	100.00	-
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,856,583,185	1,704,460,450	91.81	152,122,735
158	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,579,600	2,578,500	99.96	1,100
159	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,647,389,285	1,515,932,650	92.02	131,456,635
160	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,996,300	12,476,300	73.41	4,520,000
161	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189,618,000	173,473,000	91.49	16,145,000
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,680,174,829	1,673,774,678	99.62	6,400,151
162	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	2,000,000	100.00	-
163	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	13,700,000	7,540,450	55.04	6,159,550
164	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000	35,000,000	100.00	-
165	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,629,474,829	1,629,234,228	99.99	240,601
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,050,000	23,198,608	96.46	851,392
166	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,950,000	16,098,608	94.98	851,392
167	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,100,000	7,100,000	100.00	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3,696,550,000	3,326,520,000	89.99	370,030,000
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1,815,710,000	1,772,520,000	97.62	43,190,000
168	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1,815,710,000	1,772,520,000	97.62	43,190,000
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1,596,790,000	1,290,240,000	80.80	306,550,000
169	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1,596,790,000	1,290,240,000	80.80	306,550,000
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	284,050,000	263,760,000	92.86	20,290,000
170	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	284,050,000	263,760,000	92.86	20,290,000

	01.00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)	8,072,891,110	7,923,978,860	98.16	148,912,250
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5,745,281,110	5,619,748,860	97.82	125,532,250
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23,250,000	23,250,000	100.00	-
171	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23,250,000	23,250,000	100.00	-
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,072,745,800	3,952,336,223	97.04	120,409,577
172	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,132,500	3,132,500	100.00	-
173	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,847,422,500	3,751,698,500	97.51	95,724,000
174	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,820,900	7,338,750	57.24	5,482,150
175	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209,369,900	190,166,473	90.83	19,203,427
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,627,309,410	1,623,161,564	99.75	4,147,846
176	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	100.00	-
177	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	29,760,000	25,612,154	86.06	4,147,846
178	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,592,549,410	1,592,549,410	100.00	-
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,975,900	21,001,073	95.56	974,827
179	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,950,000	16,011,073	94.46	938,927
180	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,025,900	4,990,000	99.29	35,900
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2,327,610,000	2,304,230,000	99.00	23,380,000
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1,839,920,000	1,817,030,000	98.76	22,890,000
181	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1,839,920,000	1,817,030,000	98.76	22,890,000
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	143,390,000	143,390,000	100.00	-
182	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	143,390,000	143,390,000	100.00	-
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	344,300,000	343,810,000	99.86	490,000
183	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	344,300,000	343,810,000	99.86	490,000
	01.00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)	13,842,523,735	11,628,641,648	84.01	2,213,882,087
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,024,588,671	1,886,988,930	93.20	137,599,741
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,750,000	15,750,000	100.00	-
184	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15,750,000	15,750,000	100.00	-
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,546,977,850	1,443,712,700	93.32	103,265,150
185	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,200,350	3,191,000	99.71	9,350

186	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,210,789,500	1,121,958,200	92.66	88,831,300
187	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,765,000	5,850,000	86.47	915,000
188	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326,223,000	312,713,500	95.86	13,509,500
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439,800,821	406,417,880	92.41	33,382,941
189	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	2,000,000	40.00	3,000,000
190	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	23,835,000	17,718,450	74.34	6,116,550
191	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000	35,000,000	100.00	-
192	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375,965,821	351,699,430	93.55	24,266,391
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,060,000	21,108,350	95.69	951,650
193	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,950,000	16,118,350	95.09	831,650
194	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,110,000	4,990,000	97.65	120,000
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	11,817,935,064	9,741,652,718	82.43	2,076,282,346
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6,912,834,354	5,432,975,199	78.59	1,479,859,155
195	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	6,912,834,354	5,432,975,199	78.59	1,479,859,155
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4,326,854,860	3,779,332,119	87.35	547,522,741
196	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4,326,854,860	3,779,332,119	87.35	547,522,741
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	578,245,850	529,345,400	91.54	48,900,450
197	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	578,245,850	529,345,400	91.54	48,900,450
	01.00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)	18,935,246,315	17,167,190,007	90.66	1,768,056,308
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3,328,042,252	2,713,186,930	81.53	614,855,322
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,500,000	22,500,000	100.00	-
198	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22,500,000	22,500,000	100.00	-
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,429,928,079	1,848,030,325	76.05	581,897,754
199	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,259,500	27,232,500	99.90	27,000
200	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,103,834,826	1,545,917,500	73.48	557,917,326
201	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,247,000	6,967,500	96.14	279,500
202	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291,586,753	267,912,825	91.88	23,673,928
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850,104,173	825,213,611	97.07	24,890,562
203	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,020,000	7,020,000	100.00	-
204	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	19,215,062	12,549,500	65.31	6,665,562
205	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000	35,000,000	100.00	-
206	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788,869,111	770,644,111	97.69	18,225,000

	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,510,000	17,442,994	68.38	8,067,006
207	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,950,000	16,022,994	94.53	927,006
208	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,560,000	1,420,000	16.59	7,140,000
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15,607,204,063	14,454,003,077	92.61	1,153,200,986
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	9,581,319,954	8,717,900,017	90.99	863,419,937
209	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9,581,319,954	8,717,900,017	90.99	863,419,937
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5,693,445,109	5,414,624,060	95.10	278,821,049
210	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5,693,445,109	5,414,624,060	95.10	278,821,049
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	332,439,000	321,479,000	96.70	10,960,000
211	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	332,439,000	321,479,000	96.70	10,960,000
	01.00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)	13,446,925,794	12,935,703,056	96.20	511,222,738
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,905,976,886	1,886,983,056	99.00	18,993,830
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,750,000	12,750,000	100.00	-
212	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12,750,000	12,750,000	100.00	-
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,450,487,390	1,435,837,900	98.99	14,649,490
213	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,162,500	3,162,500	100.00	-
214	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,150,259,340	1,135,637,400	98.73	14,621,940
215	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,329,000	19,329,000	100.00	-
216	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277,736,550	277,709,000	99.99	27,550
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418,650,196	415,177,506	99.17	3,472,690
217	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,030,000	1,030,000	100.00	-
218	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	17,660,000	14,187,310	80.34	3,472,690
219	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399,960,196	399,960,196	100.00	-
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,089,300	23,217,650	96.38	871,650
220	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,950,000	16,078,350	94.86	871,650
221	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,139,300	7,139,300	100.00	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	11,540,948,908	11,048,720,000	95.73	492,228,908
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7,633,148,908	7,269,650,000	95.24	363,498,908
222	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7,633,148,908	7,269,650,000	95.24	363,498,908
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3,509,870,000	3,381,140,000	96.33	128,730,000
223	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3,509,870,000	3,381,140,000	96.33	128,730,000

	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	397,930,000	397,930,000	100.00	-
224	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	397,930,000	397,930,000	100.00	-
	01.00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)	7,220,014,104	6,864,265,054	95.07	355,749,050
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	719,331,120	648,395,054	90.14	70,936,066
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,050,000	7,050,000	100.00	-
225	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7,050,000	7,050,000	100.00	-
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462,837,544	394,836,844	85.31	68,000,700
226	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,993,500	2,983,500	99.67	10,000
227	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147,056,890	145,627,190	99.03	1,429,700
228	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,605,000	9,605,000	100.00	-
229	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303,182,154	236,621,154	78.05	66,561,000
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245,383,576	242,448,210	98.80	2,935,366
230	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	100.00	-
231	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	44,505,200	41,569,834	93.40	2,935,366
232	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000	35,000,000	100.00	-
233	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161,878,376	161,878,376	100.00	-
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,060,000	4,060,000	100.00	-
234	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,060,000	4,060,000	100.00	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	6,500,682,984	6,215,870,000	95.62	284,812,984
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4,682,021,646	4,628,280,000	98.85	53,741,646
235	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4,682,021,646	4,628,280,000	98.85	53,741,646
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1,818,661,338	1,587,590,000	87.29	231,071,338
236	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1,818,661,338	1,587,590,000	87.29	231,071,338
		Pengelolaan BLUD SMK se-Sumatera Barat	36,867,508,078	29,261,032,175	79.37	7,606,475,903
	1.01.0.00.0.00.01.0016	SMKN 1 PARIAMAN	125,000,000	12,147,925	9.72	112,852,075
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	125,000,000	12,147,925	9.72	112,852,075
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	125,000,000	12,147,925	9.72	112,852,075
237	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	125,000,000	12,147,925	9.72	112,852,075
	1.01.0.00.0.00.01.0017	SMKN 2 PARIAMAN	252,250,000	242,345,422	96.07	9,904,578
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	252,250,000	242,345,422	96.07	9,904,578
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	252,250,000	242,345,422	96.07	9,904,578
238	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	252,250,000	242,345,422	96.07	9,904,578
	1.01.0.00.0.00.01.0018	SMKN 3 PARIAMAN	200,000,000	105,780,000	52.89	94,220,000

	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200,000,000	105,780,000	52.89	94,220,000
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	200,000,000	105,780,000	52.89	94,220,000
239	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200,000,000	105,780,000	52.89	94,220,000
	1.01.0.00.0.00.01.0035	SMKN 1 BUKITTINGGI	2,408,676,000	2,003,606,139	83.18	405,069,861
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,408,676,000	2,003,606,139	83.18	405,069,861
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,408,676,000	2,003,606,139	83.18	405,069,861
240	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,408,676,000	2,003,606,139	83.18	405,069,861
	1.01.0.00.0.00.01.0036	SMKN 2 BUKITTINGGI	1,597,033,979	835,915,928	52.34	761,118,051
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,597,033,979	835,915,928	52.34	761,118,051
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,597,033,979	835,915,928	52.34	761,118,051
241	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,597,033,979	835,915,928	52.34	761,118,051
	1.01.0.00.0.00.01.0056	SMKN 1 PADANG	2,495,221,045	1,339,008,198	53.66	1,156,212,847
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,495,221,045	1,339,008,198	53.66	1,156,212,847
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,495,221,045	1,339,008,198	53.66	1,156,212,847
242	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,495,221,045	1,339,008,198	53.66	1,156,212,847
	1.01.0.00.0.00.01.0057	SMKN 2 PADANG	808,170,501	750,458,492	92.86	57,712,009
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	808,170,501	750,458,492	92.86	57,712,009
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	808,170,501	750,458,492	92.86	57,712,009
243	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	808,170,501	750,458,492	92.86	57,712,009
	1.01.0.00.0.00.01.0059	SMKN 4 PADANG	953,896,365	688,128,084	72.14	265,768,281
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	953,896,365	688,128,084	72.14	265,768,281
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	953,896,365	688,128,084	72.14	265,768,281
244	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	953,896,365	688,128,084	72.14	265,768,281
	1.01.0.00.0.00.01.0061	SMKN 6 PADANG	1,259,209,410	1,063,850,275	84.49	195,359,135
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,259,209,410	1,063,850,275	84.49	195,359,135
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,259,209,410	1,063,850,275	84.49	195,359,135
245	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,259,209,410	1,063,850,275	84.49	195,359,135
	1.01.0.00.0.00.01.0063	SMKN 8 PADANG	1,798,200,000	839,348,400	46.68	958,851,600
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,798,200,000	839,348,400	46.68	958,851,600
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,798,200,000	839,348,400	46.68	958,851,600
246	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,798,200,000	839,348,400	46.68	958,851,600
	1.01.0.00.0.00.01.0064	SMKN 9 PADANG	2,441,228,049	1,296,673,722	53.12	1,144,554,327
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,441,228,049	1,296,673,722	53.12	1,144,554,327

	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,441,228,049	1,296,673,722	53.12	1,144,554,327
247	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,441,228,049	1,296,673,722	53.12	1,144,554,327
	1.01.0.00.0.00.01.0066	SMK PP NEGERI PADANG	388,680,000	588,972,469	151.53	(200,292,469)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	388,680,000	588,972,469	151.53	(200,292,469)
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	388,680,000	588,972,469	151.53	(200,292,469)
248	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	388,680,000	588,972,469	151.53	(200,292,469)
	1.01.0.00.0.00.01.0081	SMKN 1 PAYAKUMBUH	2,722,260,000	2,957,350,391	108.64	(235,090,391)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,722,260,000	2,957,350,391	108.64	(235,090,391)
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,722,260,000	2,957,350,391	108.64	(235,090,391)
249	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,722,260,000	2,957,350,391	108.64	(235,090,391)
	1.01.0.00.0.00.01.0082	SMKN 2 PAYAKUMBUH	3,820,600,000	3,613,852,151	94.59	206,747,849
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3,820,600,000	3,613,852,151	94.59	206,747,849
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3,820,600,000	3,613,852,151	94.59	206,747,849
250	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3,820,600,000	3,613,852,151	94.59	206,747,849
	1.01.0.00.0.00.01.0090	SMKN 2 SAWAHLUNTO	340,805,000	-	-	340,805,000
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	340,805,000	-	-	340,805,000
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	340,805,000	-	-	340,805,000
251	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	340,805,000	-	-	340,805,000
	1.01.0.00.0.00.01.0114	SMKN 1 AMPEK ANGKEK	1,424,203,978	1,548,462,150	108.72	(124,258,172)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,424,203,978	1,548,462,150	108.72	(124,258,172)
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,424,203,978	1,548,462,150	108.72	(124,258,172)
252	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,424,203,978	1,548,462,150	108.72	(124,258,172)
	1.01.0.00.0.00.01.0123	SMKN 2 LUBUK BASUNG	2,797,120,000	2,333,347,168	83.42	463,772,832
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,797,120,000	2,333,347,168	83.42	463,772,832
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,797,120,000	2,333,347,168	83.42	463,772,832
253	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,797,120,000	2,333,347,168	83.42	463,772,832
	1.01.0.00.0.00.01.0142	SMKN 1 KOTO BARU	2,078,786,000	1,727,015,740	83.08	351,770,260
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,078,786,000	1,727,015,740	83.08	351,770,260
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,078,786,000	1,727,015,740	83.08	351,770,260
254	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,078,786,000	1,727,015,740	83.08	351,770,260
	1.01.0.00.0.00.01.0147	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	1,227,360,000	886,343,200	72.22	341,016,800
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,227,360,000	886,343,200	72.22	341,016,800
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,227,360,000	886,343,200	72.22	341,016,800
255	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,227,360,000	886,343,200	72.22	341,016,800

	1.01.0.00.0.00.01.0167	SMKN 1 GUGUK	1,962,970,000	1,929,011,406	98.27	33,958,594
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,962,970,000	1,929,011,406	98.27	33,958,594
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,962,970,000	1,929,011,406	98.27	33,958,594
256	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,962,970,000	1,929,011,406	98.27	33,958,594
	1.01.0.00.0.00.01.0170	SMKN 1 SULIKI	200,000,000	217,814,000	108.91	(17,814,000)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200,000,000	217,814,000	108.91	(17,814,000)
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	200,000,000	217,814,000	108.91	(17,814,000)
257	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200,000,000	217,814,000	108.91	(17,814,000)
	1.01.0.00.0.00.01.0196	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	1,296,396,000	962,872,464	74.27	333,523,536
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,296,396,000	962,872,464	74.27	333,523,536
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,296,396,000	962,872,464	74.27	333,523,536
258	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,296,396,000	962,872,464	74.27	333,523,536
	1.01.0.00.0.00.01.0220	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	770,477,855	529,757,140	68.76	240,720,715
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	770,477,855	529,757,140	68.76	240,720,715
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	770,477,855	529,757,140	68.76	240,720,715
259	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	770,477,855	529,757,140	68.76	240,720,715
	1.01.0.00.0.00.01.0296	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	95,000,000	413,201,101	434.95	(318,201,101)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95,000,000	413,201,101	434.95	(318,201,101)
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	95,000,000	413,201,101	434.95	(318,201,101)
260	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95,000,000	413,201,101	434.95	(318,201,101)
	1.01.0.00.0.00.01.0324	SMKN 1 PASAMAN	942,000,000	1,262,473,100	134.02	(320,473,100)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	942,000,000	1,262,473,100	134.02	(320,473,100)
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	942,000,000	1,262,473,100	134.02	(320,473,100)
261	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	942,000,000	1,262,473,100	134.02	(320,473,100)
	1.01.0.00.0.00.01.0339	SMKN 1 SIJUNJUNG	1,163,673,896	814,237,200	69.97	349,436,696
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,163,673,896	814,237,200	69.97	349,436,696
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,163,673,896	814,237,200	69.97	349,436,696
262	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,163,673,896	814,237,200	69.97	349,436,696
	1.01.0.00.0.00.01.0376	SMKN 1 PAINAN	1,178,290,000	277,909,910	23.59	900,380,090
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,178,290,000	277,909,910	23.59	900,380,090
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,178,290,000	277,909,910	23.59	900,380,090
263	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,178,290,000	277,909,910	23.59	900,380,090
	1.01.0.00.0.00.01.0379	SMKN 1 RANAH PESISIR	120,000,000	21,150,000	17.63	98,850,000

	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120,000,000	21,150,000	17.63	98,850,000
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	120,000,000	21,150,000	17.63	98,850,000
264	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	120,000,000	21,150,000	17.63	98,850,000
DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMBAR			2,523,027,437,087	2,410,380,936,204	95.54	112,646,500,883

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu Pendapatan yang tidak sesuai target, kegiatan yang realisasinya berada dibawah 90 % (sembilan puluh persen), kegiatan yang dilanjutkan atau kegiatan yang diberikan kesempatan untuk melewati tahun anggaran 2023 dan kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan atau putus kontrak. Penjelasan alasan atau hambatan masing-masing uraian kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan yang Tidak Sesuai Target

Pendapatan Lain-lain yang Sah yang merupakan pendapatan BLUD (28 Sekolah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 31.761.198.054,41 (87,36%) tidak tercapai sesuai target yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh:

1. Sekolah tidak memungut uang komite (sumbangan dari wali murid) sesuai rencana awal
2. Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing
3. Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat
4. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa
5. Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024

B. Kegiatan yang Realisasinya dibawah 50%

Terdapat sebanyak 19 kegiatan yang realisasinya dibawah 50% (lima puluh persen). Penjelasan keterangan atau alasan realisasi dibawah 50% tersebut dapat dijelaskan sebagaimana rincian berikut:

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		DINAS PENDIDIKAN						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2,094,868,950.00	268,185,300.00	12.80	1,826,683,650.00	87.20	Belanja Pakaian Batik Tradisional dिलanjutkan di 2025 (addendum Waktu) (Diberikan

								kesempatan 36 hari kalender dengan dikenakan denda 1% dari nilai kontrak)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	-	0.00	100,000,000.00	100.00	kegiatan terlaksana 100% tetapi belum dibayarkan karena tidak adanya ketersediaan anggaran
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,844,534,139.00	1,371,329,450.00	20.04	5,473,204,689.00	79.96	Untuk USB SMKN 11 Padang tidak terlaksana karena secara teknis belum memadai untuk dilakukan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	365,242,298.00	151,810,000.00	41.56	213,432,298.00	58.44	satu Kegiatan PAD tidak terlaksana karena masuk di Anggaran Perubahan
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100,000,000.00	-	0.00	100,000,000.00	100.00	efisiensi anggaran
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000.00	20,425,000.00	40.85	29,575,000.00	59.15	Efisiensi anggaran
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000.00	23,840,000.00	47.68	26,160,000.00	52.32	Efisiensi anggaran
2		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	2,000,000.00	40.00	3,000,000.00	60.00	Pelaksanaan sesuai kebutuhan
3		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,560,000.00	1,420,000.00	16.59	7,140,000.00	83.41	Pelaksanaan sesuai kebutuhan
4		SMKN 1 PARIAMAN						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	125,000,000.00	12,147,925.00	9.72	112,852,075.00	90.28	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
5		SMKN 8 PADANG						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,798,200,000.00	839.348.400.00	46,68	958.851.600.00	53,32	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai

7		SMKN 2 SAWAHLUNTO						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	340,805,000.00	-	0.00	340,805,000.00	100.00	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
12		SMKN 1 PAINAN						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,178,290,000.00	277.909.910.00	23,59	900.380.090,00	76,41	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
13		SMKN 1 RANAH PESISIR						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	120,000,000.00	21,150,000.00	17.63	98,850,000.00	82.38	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Kurang promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai

C. Kegiatan Lewat Tahun Anggaran

Terdapat beberapa kegiatan yang diberikan kesempatan untuk melewati Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	SUMBER DANA	SISA DANA LEWAT TAHUN	KETERANGAN/ ALASAN
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Malalak	DAU Yang Ditentukan	1.263.102.950,00	Diberikan kesempatan 134 hari kalender dengan dikenakan denda 1‰ dari nilai kontrak
2	Belanja Pakaian Batik Tradisional Dinas pendidikan Prov. Sumatera Barat Tahun 2024	PAD	1.824.263.400,00	Diberikan kesempatan 36 hari kalender dengan dikenakan denda 1‰ dari nilai kontrak
Jumlah			3.087.366.350,00	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun Anggaran 2024 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan ekuitas yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKPD; mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

m. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus hanya bagi aset tidak berwujud berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap sesuai dengan Pergub no. 05 tahun 2014 sedangkan amortisasi dilakukan berdasarkan Pergub no. 43 tahun 2014.

BAB V

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100	5.000.000,00
2.	Lain-lain PAD Yang Sah	36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36	3.196.186.541,00
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Untuk realisasi bulan Desember Tahun 2024 mencapai 87,36% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023, maka terdapat kenaikan jumlah realisasi pendapatan. Pendapatan ini terdiri dari: - Retribusi Sewa Tanah Bangunan - Pendapatan BLUD					
	• Retribusi Sewa Tanah Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
	• Pendapatan BLUD	36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36	3.196.186.541,00
Jumlah		36.362.357.537,00	31.766.198.054,41	87,36	3.201.186.541,00
Jumlah realisasi tersebut mencapai 87,36% dari jumlah dana yang dianggarkan. Penerimaan pendapatan Dinas Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 tahun 2014 tentang perubahan kedelapan atas pergub No 31 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.					

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah berasal dari Pendapatan BLUD yang terdiri dari Pendapatan BLUD 28 Sekolah Menengah Kejuruan dengan Rincian sebagai Berikut:

NOMOR	Nama Sekolah	TARGET PENDAPATAN (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024
1	SMKN 2 Padang	705,146,771.00	880,599,888.85
2	SMKN 6 Padang	568,000,000.00	1,293,335,716.88
3	SMKN 9 Padang	2,008,750,000.00	1,322,498,867.93
4	SMKN 1 Padang	2,576,621,045.00	1,429,281,619.00
5	SMKN 4 Padang	1,000,000,000.00	691,374,411.90
6	SMKN 8 Padang	1,798,200,000.00	856,434,719.15
7	SMKN PP Negeri Padang	3,328,010,000.00	599,487,469.00
8	SMKN 3 Pariaman	974,763,000.00	105,824,254.68
9	SMKN 1 Pariaman	300,000,000.00	12,585,175.00
10	SMKN 2 Pariaman	242,947,800.00	261,525,613.54
11	SMKN 1 Payakumbuh	2,981,400,000.00	3,854,434,368.09
12	SMKN 2 Payakumbuh	3,645,016,000.00	3,614,882,696.00
13	SMKN 2 Sawahlunto	293,095,000.00	9,989,083.57
14	SMKN 2 Bukittinggi	425,000,000.00	687,898,567.92
15	SMKN 1 Bukittinggi	2,451,276,000.00	2,226,371,789.00
16	SMKN 1 Guguk	470,000,000.00	2,351,378,464.49
17	SMKN 1 Suliki	340,760,000.00	244,030,000.00
18	SMKN 2 Lubuk Basung	2,818,120,000.00	2,336,051,148.00
19	SMKN 1 Ampek Angkek	1,424,203,978.00	1,610,387,150.00
20	SMKN 1 Sungai Rumbai	1,236,360,000.00	949,885,000.00
21	SMKN 1 Koto Baru	1,891,213,788.00	1,768,052,802.00
22	SMKN 1 Sintuk Toboh Gadang	1,215,467,354.00	990,309,500.00
23	SMKN 1 Lubuk Sikaping	95,000,000.00	464,358,506.68
24	SMKN 1 Pasaman	1,067,678,700.00	1,276,013,800.00
25	SMKN 1 Ranah Pesisir	120,000,000.00	22,984,000.00
26	SMKN 1 Painan	1,178,290,000.00	297.044.392.00
27	SMKN 1 Sijunjung	109,660,246.00	681,873,896.00
28	SMKN 1 Lembah Gumanti	1,092,377,855.00	770,477,855.00
JUMLAH		36,357,357,537.00	31,182,536,100.00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
a	Belanja Pegawai	1.626.736.829.717,00	1.592.002.002.278,00	97,86	1.350.697.303.210,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 97,86% dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah **Rp. 34.734.827.439,00**. Dana tersebut merupakan sisa dana Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang tidak terealisasi pada akhir tahun anggaran 2024 karena anggaran melebihi data yang disampaikan oleh OPD.

Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak menginputkan segala bentuk mutasi gaji karena anggaran yang tersedia untuk belanja Pegawai tidak mencukupi, sehingga berakibat terjadi perbedaan data Gaji Pokok pada Aplikasi SIM Gaji dengan Data Dapodik sebagai Dasar Penerimaan TPG.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan realisasi sebesar **Rp. 241.304.699.068,00** Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
Belanja Pegawai	1.626.736.829.717,00	1.592.002.002.278,00	97,86	34.595.775.087,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	985.713.212.941,00	983.573.917.921,00	99,78	2.139.295.020,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.734.682.204,00	112.739.000.715,00	94,16	6.995.681.489,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	521.288.934.572,00	495.689.083.642,00	95,09	25.599.850.930,00

Jumlah realisasi belanja pegawai mencapai **97,86%** dari anggaran

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2024 sejumlah **Rp. 323.512.337,00** yang terdiri dari :

Belanja Gaji Pokok ASN	(5.1.01.01.01.)	RP.	130,568,071.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	(5.1.01.02.03.)	RP.	148,089,292.00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	(5.1.01.03.09.)	RP.	44,104,974.00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	(5.1.01.03.11.)	RP.	750,000.00

	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
b	Belanja Barang dan Jasa	487.934.231.911,00	465.353.149.307,10	95,37	436.856.356.961,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi sampai dengan Desember Tahun 2024 sebesar **Rp. 465.353.149.307,10** mencapai **95,37%** dari anggarannya. Sisa lebih anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp.22,581,082,603.90. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.436.856.356.961,00. Adapun realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	Bertambah/ Berkurang	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Belanja Barang Pakai Habis	42,516,919,737.00	37,653,447,478.00	88.56	4,863,472,259.00	38,716,295,966.00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1,391,680.00	755,000.00	54.25	636,680.00	153,450.00
Belanja Jasa Kantor	93,811,560,201.00	87,598,713,868.00	93.38	6,212,846,333.00	85,240,864,480.00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2,921,241,484.00	2,802,683,639.00	95.94	118,557,845.00	278,802,785.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	988,905,000.00	806,490,000.00	81.55	182,415,000.00	555,220,000.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,879,885,000.00	6,720,963,000.00	97.69	158,922,000.00	6,087,618,700.00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14,100,000.00	7,500,000.00	53.19	6,600,000.00	10,100,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	359,944,640.00	254,493,300.00	70.70	105,451,340.00	964,321,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9,507,960,000.00	9,349,701,500.00	98.34	158,258,500.00	3,507,454,000.00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	538,400,000.00	497,250,000.00	92.36	41,150,000.00	475,500,000.00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	49,160,000.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	853,394,770.00	785,536,105.00	92.05	67,858,665.00	758,928,286.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	184,737,480.00	182,198,920.00	98.63	2,538,560.00	237,209,780.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00	19,943,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,372,948,700.00	10,300,209,214.00	77.02	3,072,739,486.00	12,419,622,707.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	893,491,940.00	778,909,891.00	87.18	114,582,049.00	0.00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,075,265,000.00	4,896,110,000.00	80.59	1,179,155,000.00	5,231,410,000.00
Belanja Barang dan Jasa BOS	276,407,346,201.00	274,150,899,411.00	99.18	2,256,446,790.00	279,832,836,184.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	32,606,740,078.00	28,567,287,981.10	55.25	4,039,452,096.90	2,470,916,623.00
JUMLAH	487,934,231,911.00	465,353,149,307.10	95.37	22,581,082,603.90	436,856,356,961.00

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam tahun 2024, mencapai **95,37%** dari yang dianggarkan

Jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah belanja barang dan jasa sampai dengan Desember 2024. Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja barang jasa selama tahun 2024 sejumlah **Rp. 32.806.400,00** yang terdiri dari:

Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan (5.1.02.01.01.0055) RP. 25,770,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (5.1.02.01.01.0058) RP. 6,290,000.00

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Lebih Bayar Pajak Kendaraan KCD Wil. VII Tahun 2024 Kuitansi 173) (5.1.02.02.01.0067) Rp. 746,400.00

	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
c.	Belanja Hibah	76.166.350.000,00	75.729.741.680,00	99,43	74.126.510.476,00

Untuk Tahun Anggaran 2024 Belanja Hibah yang merupakan Belanja Hibah Dana BOS sekolah Swasta dianggarkan sebesar **Rp. 76.166.350.000,00** sedangkan Realisasi sebenarnya adalah sebesar **Rp.76.744.741.680,00** sesuai Nilai Salur Dana BOS Swasta Tahun 2024 sehingga terjadi selisih antara realisasi Belanja Hibah sesuai nilai salur dengan Realisasi Belanja Hibah yang terdapat pada LRA. Hal ini terjadi karena Dana Hibah Dana BOS Kinerja Swasta sebesar **Rp. 1.015.000.000,00** masuk pada rekening Belanja barang Jasa BOS karena pada saat entry tidak ditemukan rekening belanja Dana Hibah BOS Kinerja Swasta

2. Belanja Modal

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Modal	332.190.025.459,00	277,296,042,939,00	83,48	292.008.139.154,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal per Desember tahun 2024 dan 2023. Realisasi per Desember tahun 2024 mencapai 83,48% dari anggarannya. Realisasi hingga akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 277.296.042.939,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Tanah	0,00	0,00	0	0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Tanah tahun 2024 dan 2023.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Peralatan dan Mesin	126.412.225.761,00	99.093.872.050,00	78,39	94.251.479.922,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 dan 2023. Untuk realisasi sampai dengan Desember Tahun 2024 sebesar **Rp. 99.093.872.050,00** mencapai **78,39%** dari anggarannya. Sisa lebih anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp.27.318.353.711,00. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar

Rp.94.251.479.922,00. Adapun rincian realisasi objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	Bertambah/ Berkurang	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Alat Besar Darat	18,900,000.00	17,250,000.00	91.27	1,650,000.00	20,500,000.00
Belanja Modal Alat Bantu	9,074,000.00	9,040,000.00	99.63	34,000.00	29,274,000.00
Belanja Modal Alat Angkutan	3,073,879,000.00	2,692,000,000.00	87.58	381,879,000.00	2,058,413,000.00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	11,300,000.00	10,750,000.00	95.13	550,000.00	18,659,000.00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525,000.00
Belanja Modal Alat Pengolahan	1,298,073,000.00	1,238,634,000.00	95.42	59,439,000.00	0.00
Belanja Modal Alat Kantor	7,421,062,670.00	5,844,185,110.00	78.75	1,576,877,560.00	1,949,197,800.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20,934,465,160.00	16,087,884,182.00	76.85	4,846,580,978.00	16,494,723,018.00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	0.00	48,660,000.00
Belanja Modal Alat Studio	249,473,045.00	236,614,959.00	94.85	12,858,086.00	944,281,350.00
Belanja Modal Alat Komunikasi	60,000,000.00	59,400,000.00	99.00	600,000.00	43,512,000.00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	365,706,300.00	327,250,000.00	89.48	38,456,300.00	24,241,100.00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	18,003,214,701.00	12,200,881,291.00	67.77	5,802,333,410.00	1,157,659,000.00
Belanja Modal Komputer Unit	5,120,794,796.00	4,868,411,561.00	95.07	252,383,235.00	10,349,168,140.00
Belanja Modal Peralatan Komputer	6,001,689,070.00	5,658,453,304.00	94.28	343,235,766.00	1,772,718,500.00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	31,302,291,187.00	20,699,906,434.00	66.13	10,602,384,753.00	31,102,090,750.00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000,000.00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17,145,556,996.00	16,583,232,791.00	96.72	562,324,205.00	27,590,840,810.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	12,687,975,836.00	12,246,428,224.00	96.52	441,547,612.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2,708,770,000.00	313,550,194.00	10.64	2,395,219,806.00	462,016,454.00
JUMLAH	126,412,225,761.00	99,093,872,050.00	78.39	27,318,353,711.00	94,429,479,922.00

Jumlah realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin mencapai 78,39% dari jumlah yang dianggarkan.

Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut diatas adalah jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan Desember 2024. Saldo / jumlah belanja Modal tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun 2024 sejumlah Rp. 12.000.000,00 yang terdiri dari:

Belanja Modal Mebel (Pengadaan Kursi Tamu SMKN 1 Bonjol) (5.2.02.05.02.0001) *RP.* 12,000,000.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Gedung & Bangunan	162.502.995.731,00	134.567.124.579,00	82,81	157.443.270.289,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 dan 2023. Realisasi per Desember tahun 2024 mencapai **82,81%** dari anggarannya. sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.134.567.124.579,00**.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	Bertambah/ Berkurang	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	160,975,997,731.00	134,186,930,579.00	83.36	26,789,067,152.00	157,395,290,289.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,526,998,000.00	380,194,000.00	24.90	1,146,804,000.00	47,980,000.00
JUMLAH	162,502,995,731.00	134,567,124,579.00	82.81	27,935,871,152.00	157,443,270,289.00

Jumlah realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan mencapai **82,81%** dari jumlah yang dianggarkan

Jumlah belanja modal tersebut diatas adalah jumlah realisasi belanja modal sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebesar **Rp. 134.567.124.579,00**.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2024 dan 2023. Pada Tahun 2024 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun rincian objek belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
• Belanja modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak dianggarkan pada Tahun 2024.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
Belanja Aset Tetap Lainnya	43.274.803.967,00	43.635.046.310,00	100,83	40.313.388.943,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dan 2023. Realisasi per Desember tahun 2024 mencapai **100,83%** dari anggarannya yaitu sebesar **Rp. 43.635.046.310,00**. Terdapat sisa anggaran minus sebesar **0,83%** dimana realisasi belanja lebih besar dari anggaran. Minus ini terjadi karena realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS mencapai 102,74%. Hal ini disebabkan pada saat jadwal entry akhir SIPD untuk penetapan APBD Perubahan TA 2024 pada Bulan September 2024 jadwal perubahan RKAS BOS sekolah belum selesai dan masih berubah pada posisi Desember 2024 dikarenakan Aplikasi ARKAS masih mengakomodir Satuan Pendidikan tetap bisa melakukan perubahan sampai dengan Desember 2024, sehingga belum didapat angka pasti rincian belanja BOSP untuk masing-masing sekolah pada aplikasi ARKAS.

Sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 40.313.388.943,00**.

Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	Bertambah/ Berkurang	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0.00	0.00	0.00	0.00	25,045,000.00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	3,663,000.00	3,605,000.00	98.42	58,000.00	136,736,500.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33,400,996,497.00	34,316,220,024.00	102.74	(915,223,527.00)	40,151,607,443.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	9,845,144,470.00	9,315,221,286.00	94.62	529,923,184.00	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
JUMLAH	43,274,803,967.00	43,635,046,310.00	100.83	(360,242,343.00)	40,313,388,943.00

Jumlah realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya mencapai **100,83%** dari jumlah yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS melebihi anggaran sebesar Rp.915.223.527,00 (2,74%), hal ini terjadi karena :

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS melebihi anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 397.373.327,00
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja SMA dientrikan ke dalam rekening Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp. 517.850.200,00, karena pada saat input di SIPD tidak ditemukan rekening Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja SMA

Daftar Belanja Modal per Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

ASET LANCAR

Perkiraan	2024	2023
Kas dan Setara Kas	4.555.031.554,62	2.020.511.246,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023. Adapun Rincian Saldo Kas dan Setara Kas Pada Tahun 2024 adalah terdiri dari:

Perkiraan	2024	2023
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Perkiraan	2024	2023
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	322.668.845,31,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koreksi Kas Lainnya, Kas dibendahara Pengeluaran Pembantu, Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 dan Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran pada Cabdin VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Mentawai) sebesar **Rp. 79.440.398,00**
- b. Koreksi Kas Lainnya, Kas dibendahara Pengeluaran Pembantu, Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 dan Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran pada Cabdin VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Mentawai) sebesar **Rp. 55.898.092,00**
- c. Koreksi Kas Lainnya dan Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp. 104.176.095,31**
- d. Koreksi Kas Lainnya dan Pengakuan Utang Belanja Pegawai (Internal Account/Escrow Account) Bank Nagari Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp. 83.154.260,00**

Sampai dengan 31 Desember 2024, sisa UYHD sebesar **Rp. 97.462.833,00** telah disetorkan ke Kas Daerah. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun 2024. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perkiraan	2024	2023
3. Kas di BLUD	3.010.316.420,31	510.150.541,00

Jumlah kas di BLUD tersebut merupakan sisa Kas di BLUD sesuai hasil rekonsiliasi per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di di BLUD	510.150.541,00	31,761,198,054.41	29,261,032,175.10	3,010,316,420.31

No	Nama Sekolah	Kas BLUD Tahun 2023	Pendapatan 2024	Realisasi Belanja 2024	Saldo Kas BLUD 2024
1	SMKN 2 Padang	63,371,730.00	880,599,888.85	750,458,492.00	193,513,126.85
2	SMKN 6 Padang	86,666,783.00	1,293,335,716.88	1,063,850,275.00	316,152,224.88
3	SMKN 9 Padang	134,078,049.00	1,322,498,867.93	1,296,673,722.00	159,903,194.93
4	SMKN 1 Padang	-	1,429,281,619.00	1,339,008,198.00	90,273,421.00
5	SMKN 4 Padang	-	691,374,411.90	688,128,084.00	3,246,327.90
6	SMKN 8 Padang	-	856,434,719.15	839,348,400.00	17,086,319.15
7	SMKN PP Negeri Padang	-	599,487,469.00	588,972,469.00	10,515,000.00
8	SMKN 3 Pariaman	-	105,824,254.68	105,780,000.00	44,254.68
9	SMKN 1 Pariaman	-	12,585,175.00	12,147,925.00	437,250.00
10	SMKN 2 Pariaman	-	261,525,613.54	242,345,422.10	19,180,191.44
11	SMKN 1 Payakumbuh	-	3,854,434,368.09	2,957,350,391.00	897,083,977.09
12	SMKN 2 Payakumbuh	-	3,614,882,696.00	3,613,852,151.00	1,030,545.00
13	SMKN 2 Sawahlunto	-	9,989,083.57	-	9,989,083.57
14	SMKN 2 Bukittinggi	226,033,979.00	687,898,567.92	835,915,928.00	78,016,618.92
15	SMKN 1 Bukittinggi	-	2,226,371,789.00	2,003,606,139.00	222,765,650.00
16	SMKN 1 Guguk	-	2,351,378,464.49	1,929,011,406.00	422,367,058.49
17	SMKN 1 Suliki	-	244,030,000.00	217,814,000.00	26,216,000.00
18	SMKN 2 Lubuk Basung	-	2,336,051,148.00	2,333,347,168.00	2,703,980.00
19	SMKN 1 Ampek Angkek	-	1,610,387,150.00	1,548,462,150.00	61,925,000.00
20	SMKN 1 Sungai Rumbai	-	949,885,000.00	886,343,200.00	63,541,800.00
21	SMKN 1 Koto Baru	-	1,768,052,802.00	1,727,015,740.00	41,037,062.00
22	SMKN 1 Sintuk Toboh Gadang	-	990,309,500.00	962,872,464.00	27,437,036.00
23	SMKN 1 Lubuk Sikaping	-	464,358,506.68	413,201,101.00	51,157,405.68

24	SMKN 1 Pasaman	-	1,276,013,800.00	1,262,473,100.00	13,540,700.00
25	SMKN 1 Ranah Pesisir	-	22,984,000.00	21,150,000.00	1,834,000.00
26	SMKN 1 Painan	-	297,044,392.00	277,909,910.00	19,134,482.00
27	SMKN 1 Sijunjung	-	849,727,194.00	814,237,200.00	35,489,994.00
28	SMKN 1 Lembah Gumanti	-	754,451,856.73	529,757,140.00	224,694,716.73
TOTAL		510,150,541.00	31,761,198,054.41	29,261,032,175.10	3,010,316,420.31

Perkiraan	2024	2023
4. Kas Dana BOS	0,00	1.510.360.705,00
5. Kasa Dana BOSP	1.222.046.289,00	0,00

Jumlah kas dana BOS tersebut merupakan sisa dana BOS sesuai hasil rekonsiliasi per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara BOS	1.510.360.705,00	422.529.948.963,00	422.818.263.379,00	1.222.046.289,00

Dana sebesar **Rp.1.222.046.289,00** adalah dana kas yang masih ada di bendahara BOS pada akhir Tahun 2024. Perubahan nama dari Kas Dana BOS menjadi Kas Dana BOSP pada Tahun 2024 disebabkan karena perubahan nomenklatur dari Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler menjadi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka meningkatkan efektifitas bantuan operasional yang diberikan kepada sekolah, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur dan kebijakan yang lebih terintegrasi.

Penambahan sebesar **Rp.422.529.948.963,00,-** adalah total penyaluran dana BOS TA 2024 dan koreksi tambah saldo 2024 yang terdiri dari:

- Penyaluran BOS Reguler Negeri	Rp.	340.126.466.031,00
- Penyaluran BOS Reguler Swasta	Rp.	74.152.241.680,00
- Penyaluran BOS Kinerja Negeri	Rp.	5.648.750.000,00
- Penyaluran BOS Kinerja Swasta	Rp.	2.592.500.000,00
- Penyaluran BOS Afirmasi	Rp.	0,00
- Koreksi tambah saldo	Rp.	9.991.252,00

Pengurangan sebesar **Rp.422.818.263.379,00,-** merupakan realisasi belanja BOS selama TA 2024 dan koreksi kurang saldo tahun 2024 yang terdiri dari:

- Realisasi Sisa Dana BOS	Rp.	934.637.573,00
- Realisasi BOS Reguler Negeri	Rp.	339.282.391.716,00
- Realisasi BOS Reguler Swasta	Rp.	74.152.241.680,00
- Realisasi BOS Kinerja Negeri	Rp.	5.379.972.447,00
- Realisasi BOS Kinerja Swasta	Rp.	2.592.500.000,00
- Koreksi Kurang Saldo	Rp.	476.519.963,00

Perkiraan	2024	2023
6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.138.380,20	45.079.013,14

Jumlah tersebut merupakan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan SMKN 1 Bukittinggi pada tahun 2024 dan Piutang Pendapatan BLUD SMKN 6 Padang per Desember 2023 yang merupakan Piutang dari RedDoorz bulan Desember dan sudah diterima pada Tahun 2024.

Perkiraan	2024	2023
7. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	55.691,90	225.395,07

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan pada Tahun 2024 dan 2023.

Perkiraan	2024	2023
8. Beban Dibayar Dimuka	1.632.249.685,00	95.291.003,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka yang berupa :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban jasa premi asuransi BMD	95.291.003,00	2.187.818.759,00	650.860.077,00	1.632.249.685,00

Penambahan adalah pengakuan beban premi asuransi Barang Milik Daerah TA 2024.

Pengurangan adalah pemakaian beban asuransi dibayar dimuka periode sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp. 62.909.249,00 untuk pemakaian Beban tahun 2023 dan Rp. 587.950.828,00 untuk pemakaian beban asuransi di dibayar dimuka tahun 2024.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2024	2023
7. Persediaan	24.764.333.752,00	9.783.164.381,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024, yaitu :

- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor senilai Rp. 3.339.268.270,00,-
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat senilai Rp. 21.425.065.482,00 yang berasal dari Reklasifikasi :
 - ✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 12.796.174.282,00 yang diserahkan untuk 45 Sekolah yang terdiri dari SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta
 - ✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp. 8.628.891.200,00 yang diserahkan untuk 10 Sekolah Luar Biasa Swasta

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Bahan Pakai Habis	5.479.095.439,00	3.339.268.270,00	5.479.095.439,00	3.339.268.270,00
Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00	705.000,00	0,00
	4.304.068.942,00	21.425.065.482,00	4.304.068.942,00	21.425.065.482,00

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat				
--	--	--	--	--

Penambahan Persediaan adalah pembelian Tahun Anggaran 2024 sesuai Berita Acara stock opname dan berasal dari Belanja Modal untuk Sekolah Swasta yang direklas ke persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat. Namun sampai tanggal 31 Desember 2024 Berita Acara serah terima untuk penyerahannya belum selesai sehingga masih tercatat sebagai persediaan pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan adalah pemakaian bahan habis pakai sesuai Berita Acara stock opname. Selengkapanya dapat dilihat pada Lampiran 16.

ASET TETAP

Perkiraan	2024	2023
Tanah	554.261.942.444,34	548.638.994.445,34
Peralatan dan Mesin	1.222.576.882.683,22	1.118.454.048.903,22
Gedung dan Bangunan	2.544.259.679.771,14	2.391.132.539.097,14
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	429.369.359.926,65	386.397.146.013,65
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.125.899.932,89	17.889.389.606,89
Jumlah Aset Tetap	4.750.467.864.825,35	4.462.512.118.066,24
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(963.238.672.362,12)	(880.748.222.191,44)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(636.602.205.129,18)	(589.777.729.898,32)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(151.620.117,40)	(102.173.791,04)
Total Akumulasi Penyusutan	(1.599.992.497.608,70)	(1.470.628.125.880,80)
Nilai Aset Tetap	3.169.601.267.149,55	2.991.883.992.185,45

Perkiraan	2024	2023
1. Tanah	554.261.942.444,34	548.638.994.445,34

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 dan akhir Tahun Anggaran 2023 .

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	107.560.753.080,00
b.	Harga Perolehan 2006 sd 2023	441.078.241.365,34
c.	Penambahan 2024	5.622.947.999,00

Daftar Tanah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	548.638.994.445,34	5.622.947.999,00	0,00	554.261.942.444,34

	Saldo Audited 2023	-	548.638.994.445,34
	<u>Mutasi Tambah</u>		
	Koreksi Nilai Saldo Awal	0,00	
	Hibah Pihak Lainnya	122.400.001,00	
	Koreksi BPK	5.500.547.998,00	
	Total Mutasi Tambah		5.622.947.999,00
	<u>Mutasi Kurang</u>		
	Mutasi dari Disdik ke Sekolah	0,00	
	Total Mutasi Kurang		0,00
	Total Mutasi		122.400.001,00
	Saldo per 31 Des 2024		548.761.394.446,34

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Hibah Tanah dari Komite untuk SMAN 1 Sungai Aursebesar Rp. 100.000.000,00
- b) Hibah Tanah dari Komite untuk SMAN 1 Rambatansebesar Rp. 22.400.000,00
- c) Hibah Tanah dari Komite untuk SMKN 2 Padang Panjang sebesar Rp. 1,00
- d) Koreksi BPK (Koreksi tambah nilai 6 bidang tanah yang sebelumnya dicatat RP. 5, setelah dihitung berdasarkan NJOP bertambah sebesar Rp. 290.850.000,00 untuk Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun, Rp. 5.939.999 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah LAinnya, dan Rp. 5.203.757.999,00 untuk Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada Pengurangan nilai Aset Tanah dari Dinas Pendidikan ke Sekolah pada tahun anggaran 2024.

Rekapitulasi daftar mutasi tambah dan kurang Aset tetap tanah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024	2023
2. Peralatan dan Mesin	1.222.576.882.683.22	1.118.454.048.903,22

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 dan 2023.

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	127.119.000,00
b.	Harga Perolehan 2006 sd 2023	1.118.326.929.903.22
c.	Penambahan 2024	126.565.027.671,00

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	1.118.454.048.903,22	126.565.027.671,00	22.442.193.891,00	1.222.576.882.683.22
Akm Peny. Peralatan & Mesin	880.748.222.191,44	83.203.762.795.80	713.312.625.12	963.238.672.362.12
Nilai Buku	237,705,826,711.78	43,361,264,875.20	21,728,881,265.88	259,338,210,321.10

Saldo Audited 2023		1.118.454.048.903,22
<u>Mutasi Tambah</u>		
Belanja Modal per Desember 2024	69.950.660.841,00	
Belanja Modal BOS per Desember 2024	28.829.661.015,00	
Belanja Barang dan Jasa Dikapitalisir Disdik per Desember 2024	16.834.847,00	
Belanja Barang dan Jasa Dikapitalisir BOS per Desember 2024	610.253.883,00	
Belanja Modal BLUD per Desember 2024	313,550,194.00	
Koreksi Belanja Modal (Utang 2024)	15.417.929.285,00	
Hibah Pihak Lainnya (Komite Sekolah)	4.124.622.688,00	
Mutasi antar SKPD	5.717.641.824,00	
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan (Disdik)	837.895.498,00	
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan (BLUD)	6.500.000,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya (BOS)	735.872.596,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya (Disdik)	3.605.000,00	
Total Mutasi Tambah		126.565.027.671,00
<u>Mutasi Kurang</u>		
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Disdik	7.165.009.704,00	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir BLUD	24.084.300,00	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir BOS	1.380.945.290,00	
Koreksi Belanja Modal (Utang 2023)	57.800.000,00	

Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usulan Penghapusan)	733.702.950,00	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (BOS)	21.564.560,00	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (Disdik)	99.502.216,00	
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya BOS	163.410.589,00	
Reklasifikasi ke Persediaan	12.796.174.282,00	
Total Mutasi Kurang		22.442.193.891,00
Total Mutasi		104.122.833.780,00
Saldo per 31 Desember 2024		1.222.576.882.683.22

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan selama Tahun 2024 senilai Rp.69.950.660.841,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS per Desember 2024 senilai Rp. 28.829.661.015,00
- Belanja Barang dan Jasa Dikapitalisir Disdik per Desember 2024 Rp. 16.834.847,00
- Belanja Barang dan Jasa Dikapitalisir BOS per Desember 2024 Rp. 610.253.883,00
- Belanja Modal BLUD per Desember 2024 Rp. 313,550,194,00
- Koreksi Belanja Modal (Pengakuan Utang 2024) senilai Rp. 15.417.929.285,00
- Hibah Pihak Lainnya (Komite Sekolah) senilai Rp. 4.124.622.688,00
- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 5.717.641.824,00
- Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan (Disdik) senilai Rp. 837.895.498,00
- Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan (BLUD) senilai Rp. 6.500.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya (BOS) senilai Rp. 735.872.596,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya (Disdik) senilai Rp. 3.605.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- Belanja Modal Aset Peralatan dan Mesin yang tidak Dikapitalisir Disdik senilai Rp.7.165.009.704.00
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir BLUD senilai Rp. 24.084.300,00
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir BOS senilai Rp. 1.380.945.290,00
- Koreksi Belanja Modal (Pembayaran Utang belanja 2023) senilai Rp. 57.800.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usulan Penghapusan) senilai Rp. 733.702.950,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (BOS) Rp. 21.564.560,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (Disdik) Rp. 99.502.216,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 163.410.589,00
- Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp. 12.796.174.282,00

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024	2023
3. Gedung dan Bangunan	2.544.259.679.771,14	2.391.132.539.097,14

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023.

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	27.626.154.121,00
b.	Harga Perolehan 2006 sd 2023	2.363.506.384.976,14
c.	Penambahan 2024	126.565.027.671,00

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per Desember 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	2.391.132,539,097,14	165.326.283.391,00	12.199.142.717,00	2.544.259.679.771,14
Akm Peny Gedung & Bangunan	589,777,729,898.32	47.058.125.007.16	233.649.776.30	636,602,205,129.18
Nilai Buku	1,801,354,809,198.80	118,268,158,383.84	11,965,492,940.70	1,907,657,474,641.96

Saldo Audited 2023		2,391,132,539,097.14
<u>Mutasi Tambah</u>		
Belanja Modal BLUD tahun 2024	380.194.000,00	
Belanja Modal Disdik tahun 2024	134.186.930.579,00	
Belanja Barang dan Jasa Dikapitalisir BOS 2024	24.420.000,00	
Koreksi Nilai Pihak Lainnya	0	
Hibah Pempus/Kab/Kota	0	
Hibah Pihak Lainnya (Komite Sekolah)	17.631.703.400,00	
Koreksi Internal (Pengakuan utang Belanja 2024)	12.981.968.636,00	
Mutasi dari Disdik ke Sekolah	0	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (BOS)	21.564.560,00	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (Disdik)	99.502.216,00	
Reklasifikasi dari Aset Dipakai Pihak Lain	0	
Koreksi BPK	0	
Total Mutasi Tambah		165.326.283.391,00
<u>Mutasi Kurang</u>		
Belanja Modal tahun 2024 yang tidak di kapitalisir	0.00	
Belanja Modal BLUD tahun 2024 yang tidak dikapitalisir	32.260.000,00	
Koreksi Pembayaran Utang BM tahun 2023	627.039.181.00	
Koreksi nilai Pihak Lainnya	0.00	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usulan Penghapusan)	830.046.512,00	
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (BLUD)	6.500.000.00	
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (Disdik)	837.895.498.00	
Reklasifikasi ke KDP	1.236.510.326,00	
Reklasifikasi ke Persediaan	8.628.891.200,00	
Koreksi BPK	0.00	
Total Mutasi Kurang		12.199.142.717,00
Total Mutasi		153.127.140.674,00
Saldo per 31 Desember 2024		2.544.259.679.771,14

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD senilai Rp. 380.194.000,00
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Disdik senilai Rp. 134.186.930.579,00
- c) Belanja Barang dan Jasa Dikapitalisir BOS 2024 senilai Rp. 24.420.000,00
- d) Hibah Pihak Lainnya (Komite Sekolah) senilai Rp. 17.631.703.400,00
- e) Koreksi Internal (Pengakuan utang Belanja 2024) senilai Rp. 12.981.968.636,00
- f) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (BOS) senilai Rp. 21.564.560,00
- g) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (Disdik) senilai Rp. 99.502.216,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal BLUD tahun 2024 yang tidak dikapitalisir senilai Rp. 32.260.000,00
- b) Koreksi Pembayaran Utang Belanja Modal tahun 2023 senilai Rp. 627.039.181,00
- c) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usulan Penghapusan) senilai Rp. 830.046.512,00
- d) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (BLUD) senilai Rp. 6.500.000,00
- e) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (Disdik) senilai Rp. 837.895.498,00
- f) Reklasifikasi ke KDP senilai Rp. 1.236.510.326,00
- g) Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp. 8.628.891.200,00

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024	2023
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak Memiliki Penambahan dan pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2024.

Perkiraan	2024	2023
5. Aset Tetap Lainnya	429.369.359.926,65	386,397,146,013.65

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	100.077.000,00
b.	Harga Perolehan 2006 sd 2023	386.397.146.013.65
c.	Penambahan 2024	42.972.213.913,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	386,397,146,013.65	43.933.399.759,00	961.185.846,00	429.369.359.926.65
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	102,173,791.04	49.446.326.36	0	151.620.117.40
Nilai Buku	386,294,972,222.61	43.883.953.432.64	961.185.846,00	429,217,739,809.25

Saldo Audited 2023		386,397,146,013.65
<u>Mutasi Tambah</u>		
Belanja Modal Disdik tahun 2024	3.605.000,00	
Belanja Modal BOS tahun 2024	43.631.441.310,00	
Belanja Barang & Jasa BOS Dikapitalisir 2024	124.142.860,00	
Koreksi Nilai Saldo Awal	0	
Hibah Pihak Lainnya (Komite Sekolah)	10.800.000,00	
Reklasifikasi dari Peraatan dan Mesin BOS	163.410.589,00	
Total Mutasi Tambah		43.933.399.759,00
<u>Mutasi Kurang</u>		
Belanja Modal yg tdk dikapitalisir BOS	109.187.050.00	
Koreksi Saldo awal	0	
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin BOS	735.872.596,00	
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin Disdik	3.605.000,00	
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud BOS	7.450.000,00	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usulan Penghapusan)	105.071.200,00	
Total Mutasi Kurang		961.185.846,00
Total Mutasi		42.972.213.913,00
Saldo per 31 Desember 2024		429.369.359.926.65

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Disdik tahun 2024 sebesar Rp. 3.605.000.00
- Belanja Modal BOS tahun 2024 sebesar Rp. 43.631.441.310,00
- Belanja Barang & Jasa BOS Dikapitalisir 2024 sebesar Rp. 124.142.860,00
- Hibah Pihak Lainnya (Komite Sekolah) sebesar Rp. 10.800.000,00
- Reklasifikasi dari Peraatan dan Mesin BOS sebesar Rp. 163.410.589,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS yang tidak dikapitalisir senilai Rp. 109.187.050,00
- b) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp. 735.872.596,00
- c) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin Disdik sebesar Rp. 3.605.000,00
- d) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud BOS sebesar Rp. 7.450.000,00
- e) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usulan Penghapusan) sebesar Rp. 105.071.200,00

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024	2023
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	19.125.899.932.89	17,889,389,606.89

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di SKPD Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 .

Mutasi Tambah-Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17,889,389,606.89	1.236.510.326,00	0,00	19.125.899.932.89

Saldo Audited 2023	17,889,389,606.89
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan	1.236.510.326,00
Total Mutasi Tambah	1.236.510.326,00
Mutasi Kurang	
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	1.236.510.326,00
Saldo per 31 Des 2024	19.125.899.932.89

Penjelasan Mutasi Tambah

- 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp. **1.236.510.326,00**

Penjelasan Mutasi Kurang

- 1) Tidak terdapat mutasi kurang untuk Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2024

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024	2023
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1,599,992,497,608.70	1,470,628,125,880.80

Terdiri dari :

Perkiraan	2024	2023
• Akm. Penyusutan Peralatan & Mesin	963,238,672,362.12	880,748,222,191.44
• Akm. Penyusutan Gdg dan Bangunan	636,602,205,129.18	589,777,729,898.32
• Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	151,620,117.40	102,173,791.04

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peralatan dan Mesin	880,748,222,191.44	83.203.762.795.80	713.312.625.12	963.238.672.362.12
Akm. Gedung dan Bangunan	589,777,729,898.32	47.058.125.007.16	233.649.776.30	636,602,205,129.18
Akm Aset Tetap Lainnya	102,173,791.04	49.446.326.36	0.00	151.620.117.40
Jumlah Akm Penyusutan	1,470,628,125,880.80	130,311,334,129.32	946,962,401.42	1,599,992,497,608.70

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap Lainnya
Saldo Akm Penyusutan Per 31 Des 2023 (Neraca)	880,748,222,191.44	589,777,729,898.32	102,173,791.04
• Jumlah Koreksi Tambah:	83.203.762.795.80	47.058.125.007.16	49.446.326.36
o Koreksi - Saldo Awal	0,00	0,00	0.25
o Koreksi Hibah Pempus	0,00	0,00	0,00
o Koreksi hibah pihak lainnya	0,00	0,00	0,00
o Hibah pempus/kab/kota	0,00	0,00	0,00
o Hibah pihak lainnya (Komite)	258,895,246.27	213,151,792.33	0,00
o Mutasi antar SKPD	5,717,641,824.00	0,00	0,00
o Mutasi dari Disdik ke sekolah	0,00	0,00	0,00
o Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00
o Beban Penyusutan per Desember 2024	77,227,225,725.53	46,844,973,214.83	49,446,326.36
o Koreksi BPK	0,00	0,00	0,00
• Jumlah Koreksi Kurang:	713.312.625.12	233.649.776.30	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	0,00	0,00	0,00
o Koreksi hibah pihak lainnya	0,00	0,00	0.00
o Mutasi dari Disdik ke Sekolah	0,00	0,00	0.00
o Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	713,312,625.12	233,649,776.30	0,00
o Koreksi BPK	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Akm Penyusutan Per 31 Desember 2024	963,238,672,362.12	636,602,205,129.18	151.620.117.40

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berasal dari:
- Hibah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga (Komite Sekolah) senilai Rp. 258.895.246,27
 - Mutasi Antar SKPD senilai Rp. 5.717.641.824,00
 - Beban penyusutan tahun 2024 senilai Rp. 77.227.225.725,53
- b) Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berasal dari:
- Hibah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari Pihak Ketiga/pihak lainnya Komite Sekolah senilai Rp. 213.151.792,33
 - Beban penyusutan tahun 2024 senilai Rp. 46.844.973.214,83
- c) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya berasal dari:
- Beban penyusutan tahun 2024 senilai Rp. 49.446.326,36

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berasal dari:
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain - Aset Tak Bermanfaat senilai Rp. 713.312.625,12
- b) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berasal dari:
- Reklasifikasi ke Aset Tak Bermanfaat senilai Rp. 233.649.776,30
- c) Tidak ada pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2024	2023
1. Aset Tidak Berwujud	2.371.101.063,50	2.363.651.063,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	2.363.651.063,50	7,450,000.00	0,00	2,371,101,063.50
Akm Amortisasi	2.360.688.633,18	2.226.215,00	0,00	2,362,914,848.18
Nilai Buku	2.962.430,32	5,223,785	(0,00)	8,186,215.32

Perkiraan	2024	2023
2. Akm. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.362,914,848.18	2.360.688.633,18

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.360.688.633,18	2,226,215.00	0,00	2,362,914,848,18

Uraian	Nilai
Saldo Akm. Amortisasi Per 31 Des 2023 (Neraca)	2.360.688.633,18
• MUTASI TAMBAH KOREKSI SALDO AWAL	0,00
• MUTASI TAMBAH BEBAN AMORTISASI PER 31 DES 2024	2,225,215.00
• MUTASI KURANG KOREKSI SALDO AWAL	0,00
• Saldo Akhir Akm Amortisasi Per 31 Des 2024	2,362,914,848,18

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akm.Amortisasi Aset Tidak Berwujud :**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Beban Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.226.215,00

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak mutasi kurang Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2024

Perkiraan	2024	2023
3. Aset Lain-Lain	41.728.023.759,12	40.059.203.097,12

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	40.059.203.097,12	1.668.820.662,00	0,00	41.728.023.759,12
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Dalam Penelusuran	0,00	0,00	0,00	0,00

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. **41.728.023.759,12** tersebut merupakan kondisi per 31 Desember 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	40.059.203.097,12	1.668.820.662,00	0,00	41.728.023.759,12
Akm Penyusutan	31.294.199.299,76	946.962.401,42	0,00	32.241.161.701,18
Nilai Buku	8.765.003.797,36	721.858.260,58	0,00	9.486.862.057,94

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Terdapat Reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 1.668.820.662,00 per Desember 2024 dengan rincian :
- Rp. 733.702.950,00 dari Peralatan dan mesin
 - Rp. 830.046.512,00 dari Gedung dan Bangunan

Penjelasan Mutasi kurang

- a) Tidak terdapat mutasi kurang dari Aset Tidak Bermanfaat per Desember 2024.

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat:

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Terdapat reklasifikasi akumulasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp. 713.312.625,12 per 31 Desember 2024.
- b) Terdapat reklasifikasi akumulasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp.233.649.776,30 per 31 Desember 2024.
- c) Terdapat Beban penyusutan dari Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp.279.208.847,94 per Desember 2023.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Tidak terdapat mutasi kurang dari Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat per Desember 2024.

.5.2.2. KEWAJIBAN**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Perkiraan	2024	2023
1. Pendapatan diterima Dimuka	0,00	76.399.215,17

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 dan 2023.

Perkiraan	2024	2023
2. Utang Belanja	37.642.853.847,00	9.708.328.079,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2024. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa dan Utang Belanja Modal dengan rincian :

- **Utang belanja pegawai Rp. 8.500.683.729,00**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	8.087.298.045,00	8.500.683.729,00	8.087.298.045,00	8.500.683.729,00

Penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.500.683.729,00 adalah pengakuan utang yang rincian dan penjelasannya sebagai berikut :

Uraian Utang Belanja Pegawai	Jumlah	Alasan
Utang belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	12,042,786.00	Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024
Utang belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	4,148,400.00	Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1,584,445,749.00	Anggaran Tidak Mencukupi
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	339,841,181.00	Anggaran Tidak Mencukupi

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,145,002,990.00	Anggaran Tidak Mencukupi dan Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 (Koreksi BPK)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1,957,166,112.00	Anggaran Tidak Mencukupi dan Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 (Koreksi BPK)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	813,665,330.00	Anggaran Tidak Mencukupi dan Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 (Koreksi BPK)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	175,684,292.00	Anggaran Tidak Mencukupi
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	180,702,550.00	Anggaran Tidak Mencukupi
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	45,855.00	Anggaran Tidak Mencukupi
Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	209,566,184.00	Karena ada SKTP yang Baru terbit pada tanggal 10 januari 2025 dan karena ada perbedaan nilai Gaji Pokok di Dapodik dengan SIMBAR dan Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 (Koreksi BPK)
Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	58,400,700.00	Dana Salur untuk pembayaran TKG PNSD dari Pusat tidak mencukupi untuk 6 Orang PNSD selama 3 bulan (Bulan Okt sd Des 2023)
Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- TPG PPPK	19,221,600.00	Karena ada SKTP yang Baru terbit pada tanggal 10 januari 2025, dan karena ada perbedaan nilai Gaji Pokok di Dapodik dengan SIMBAR
Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK	750,000.00	Karena ada satu orang PPPK yang belum terusulkan pada waktu pengusulan Pembayaran TW IV
TOTAL	8,500,683,729.00	

Pengurangan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.087.298.045,00 adalah Utang Belanja Pegawai tahun 2023 yang telah dibayarkan.

- **Utang belanja barang dan Jasa Rp. 742.272.197,00**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	936.190.853,00	742.272.197,00	936.190.853,00	742.272.197,00

Penambahan utang sebesar Rp. 742.272.197,00 adalah pengakuan utang Belanja Barang dan Jasa yang rincian nilai dan penjelasannya sebagai berikut :

Uraian Utang Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Alasan
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	408,606.00	tagihan pembayaran bulan Desember yang dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	5,791,817.00	
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	54,132,471.00	
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,719,303.00	
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	560,224,000.00	Tidak tersedia lagi dana PAD
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	78,240,000.00	Tidak tersedia lagi dana PAD
Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40,756,000.00	Tidak tersedia lagi dana PAD
TOTAL	742.272.197.00	

Pengurangan sebesar Rp. 936.190.853,00 adalah pembayaran utang belanja barang dan jasa tahun 2023.

- **Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 15.417.929.285,00**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	57.800.000,00	15.417.929.285,00	57.800.000,00	15.417.929.285,00

Utang BM Peralatan dan Mesin				
------------------------------	--	--	--	--

Penambahan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2024 adalah berasal dari:

Uraian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Jumlah	Alasan
Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	352,800,000.00	DAK Salur Tahap III SMK belum terpenuhi dan Tidak tersedia lagi dana PAD
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	1,219,234,285.00	
Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	803,100,000.00	
Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1,676,000.00	
Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3,883,871,000.00	
Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	9,157,248,000.00	
TOTAL	15.417.929.285.00	

Pengurangan sebesar Rp. 57.800.000,00 adalah pembayaran utang belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023.

- **Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 12.981.968.636,00**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang BM Gedung dan Bangunan	627.039.181,00	12.981.968.636,00	627.039.181,00	12.981.968.636,00

Untuk Tahun 2024 penambahan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan yang belum dibayarkan sebesar Rp. 12.981.968.636,00 dan Pengurangan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 627.039.181,00 adalah pembayaran utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2023.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

5.2.3 EKUITAS

Perkiraan	2024	2023
1. Ekuitas	3.172.416.159.255,72	3.002.811.051.367,02

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024.

Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas Awal	3.002.811.051.367,02
• Koreksi Ekuitas	26.487362.414,47
• RK/PPKD	2.381.615.787.169,31
• Surplus/Defisit LO	(2.238.498.041.695,08)

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**5.3.1 PENDAPATAN-LO**

Perkiraan	2024	2023
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO	31.808.656.636,64	3.169.866.338,97

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO per Desember Tahun 2024 dan dalam Tahun 2023. Pendapatan tersebut merupakan keseluruhan pendapatan di Tahun 2024 senilai **Rp. 31.808.656.363,64** yang merupakan pendapatan Retribusi Daerah-LO per Desember Tahun 2024. Pendapatan ini terdiri dari:

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO Rp. 5.000.000,00
- Pendapatan dari BLUD-LO Rp. 31.320.202,03
- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO Rp. 31.772.336.434,61

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
• Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
• Pendapatan BLUD	0,00	31.320.202,03	31.320.202,03
• Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	31.761.198.054,41	31.772.336.434,61	11.138.380,20
Jumlah	31.766.198.054,41	22.269.340.431,68	42.458.582,23

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO. Hal ini terjadi karena ada Pendapatan diterima dimuka BLUD SMKN 2 Padang Senilai Rp. 76.399.215,17 yang sudah habis masa berlakunya (kadaluarsa), Piutang Pendapatan SMKN 6 Padang senilai Rp. 45.079.013,14 yang sudah dibayar dan pengakuan piutang Pendapatan BLUD dari jasa layanan SMKN 1 Bukittinggi senilai Rp. 11.138.380,20

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2024	2023
a. Beban Pegawai	1.592.415.387.962,00	1.358.476.691.755,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan ASN-LO, Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO, yaitu:

Uraian Beban	Realisasi
Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO	985.488.489.335,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	117.685.737.201,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO	489.241.161.426,00
Jumlah	1.592.415.387.962,00

Terdapat perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO per Desember 2024.

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	983,573,917,921.00	985,488,489,335.00	(1,914,571,414.00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	112,739,000,715.00	117,685,737,201.00	(4,946,736,486.00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	495,689,083,642.00	489,241,161,426.00	6,447,922,216.00
JUMLAH	1,592,002,002,278.00	1,592,415,387,962.00	(413,385,684.00)

- Selisih Belanja Gaji dan Tunjangan ASN – LRA dengan Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO sebesar Rp. 1.914.571.414,00 adalah Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 (Koreksi BPK) untuk pengakuan Utang Gaji Pokok PNS dan PPPK, Pengakuan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan PPPK Tahun 2024 dengan rincian:

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Gaji Pokok PNS	597,930,940,186.00	597,942,982,972.00	(12,042,786.00)
Beban Gaji Pokok PPPK	147,557,225,491.00	147,561,373,891.00	(4,148,400.00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	41,274,858,519.00	42,859,304,268.00	(1,584,445,749.00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9,342,997,876.00	9,656,932,355.00	(313,934,479.00)
JUMLAH	796,106,022,072.00	798,020,593,486.00	(1,914,571,414.00)

- Selisih Belanja Tambahan Penghasilan ASN – LRA dengan Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO sebesar Rp. 4.946.736.486,00 adalah Pengakuan Utang Belanja Pegawai pada Internal Account/Escrow Account Bank Nagari Tahun 2024 (Koreksi BPK),

Pengakuan Utang Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 sebesar Rp. 6.211.462.147,00 dan pembayaran utang Tahun 2023 sebesar Rp. 1.325.530.643,00 dengan rincian :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	75,318,305,954.00	78,433,743,538.00	(3,115,437,584.00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	26,462,370,618.00	27,730,235,625.00	(1,267,865,007.00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	6,708,989,844.00	7,284,509,109.00	(575,519,265.00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	2,031,300,283.00	1,777,661,526.00	253,638,757.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2,278,838,998.00	2,459,541,548.00	(180,702,550.00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0.00	45,855.00	(45,855.00)
JUMLAH	112,799,805,697.00	117,685,737,201.00	(4,885,931,504.00)

- Selisih Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LRA dengan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO sebesar Rp. 6,509,978,400.00 adalah Pengakuan Utang Tahun 2024 Rp. 225.882.300,00 dan Pembayaran Utang Tahun 2023 Rp. 6.735.860.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban TPG PNSD	422,495,797,532.00	422,003,704,832.00	492,092,700.00
Beban TKG PNSD	2,458,596,900.00	2,516,997,600.00	(58,400,700.00)
Beban TPG PPPK	62,967,854,994.00	56,890,818,594.00	6,077,036,400.00
Beban Tamsil Guru PPPK	3,565,000,000.00	3,565,750,000.00	(750,000.00)
JUMLAH	491,487,249,426.00	484,977,271,026.00	6,509,978,400.00

Perkiraan	2024	2023
b. Beban Barang & Jasa	469.297.479.077,00	445.530.794.671,56,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Uraian Beban	Realisasi
Beban Barang	51.581.005.866.00
Beban Jasa	106,253,085,398.00
Beban Pemeliharaan	959,212,275.00
Beban Perjalanan Dinas	10,842,380,688.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,896,110,000.00
Beban Barang dan Jasa BOS	274,882.215.008.00
Beban Barang dan Jasa BLUD	19,883.469.842.00
Jumlah	469.297.479.077,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Barang Pakai Habis	37,653,447,478.00	51,580,250,866.00	(13,926,803,388.00)
Beban Barang Tak Habis Pakai	755,000.00	755,000.00	-
Beban Jasa Kantor	87,598,713,868.00	87,330,622,641.00	268,091,227.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2,802,683,639.00	1,265,724,957.00	1,536,958,682.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	806,490,000.00	759,490,000.00	47,000,000.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6,720,963,000.00	6,716,063,000.00	4,900,000.00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	7,500,000.00	7,500,000.00	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	254,493,300.00	332,733,300.00	(78,240,000.00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9,349,701,500.00	9,349,701,500.00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	497,250,000.00	491,250,000.00	6,000,000.00
Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	785,536,105.00	780,513,355.00	5,022,750.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,198,920.00	178,698,920.00	3,500,000.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,300,209,214.00	10,063,470,797.00	236,738,417.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	778,909,891.00	778,909,891.00	-
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,896,110,000.00	4,896,110,000.00	-
Beban Barang dan Jasa BOS	274,150,899,411.00	274,882,215,008.00	(731,315,597.00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	18,016,158,076.00	19,827,125,542.00	(1,810,967,466.00)
JUMLAH	454,802,019,402.00	469,241,134,777.00	-14,439,115,375.00

- Selisih Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp. (13,926,803,388.00) adalah merupakan :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	60,589,530.00	60,589,530.00	-
Beban Bahan-Bahan Kimia	3,741,480.00	3,000,000.00	741,480.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	512,286,645.00	512,286,645.00	-
Beban Bahan-Bahan Baku	9,210,000.00	9,210,000.00	-
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4,860,000.00	4,860,000.00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	3,900,000.00	3,900,000.00	-
Beban Bahan-Bahan Lainnya	196,960,528.00	7,361,970,232.00	(7,165,009,704.00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1,523,700.00	1,523,700.00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	513,160,010.00	4,779,628,069.00	(4,266,468,059.00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	302,124,400.00	(181,428,900.00)	483,553,300.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,420,612,022.00	1,325,715,362.00	94,896,660.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	133,145,000.00	132,585,000.00	560,000.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	434,029,250.00	(221,679,843.00)	655,709,093.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	224,099,700.00	224,099,700.00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	229,545,800.00	50,827,049.00	178,718,751.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	13,860,000.00	13,860,000.00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	139,825,500.00	44,933,345.00	94,892,155.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	789,279,999.00	789,279,999.00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	741,703,475.00	115,578,597.00	626,124,878.00
Beban Obat-Obatan-Obat	-	-	-
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12,248,472,400.00	17,112,765,342.00	(4,864,292,942.00)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	-	-	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	2,720,749,439.00	2,608,596,439.00	112,153,000.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,650,000.00	4,650,000.00	-
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	13,390,322,000.00	13,390,322,000.00	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,972,036,500.00	1,850,418,500.00	121,618,000.00

Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	898,893,600.00	898,893,600.00	-
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	44,600,000.00	44,600,000.00	-
Beban Pakaian Adat Daerah	172,430,000.00	172,430,000.00	-
Beban Pakaian Batik Tradisional	144,000,000.00	144,000,000.00	-
Beban Pakaian Olahraga	237,861,500.00	237,861,500.00	-
Beban Pakaian Paskibraka	84,975,000.00	84,975,000.00	-
Beban Pakaian Jas/Safari	-	-	-
JUMLAH	37,653,447,478.00	51,580,250,866.00	- 13,926,803,388.00

- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Tahun 2023 Rp. 741.480,00
- ✓ Penyesuaian Beban Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Disdik Tidak Dikapitalisir) Rp. 7.165.009.704,00
- ✓ Penyesuaian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.266.468.059,00
- ✓ Penyesuaian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 483.553.300,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2023 Rp. 23.897.100,00 dan Penyesuaian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 70.999.560,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Tahun 2023 Rp. 560.000,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Tahun 2023 Rp. 990.000,00 dan Penyesuaian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 654.719.093,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Tahun 2023 Rp. 6.288.000,00 dan Penyesuaian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp. 172.430.751,00
- ✓ Penyesuaian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga Rp.94.892.155,00
- ✓ Penyesuaian Pengakuan Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2024 Rp. 40.756.000,00, Penyesuaian Persediaan Disdik Rp. 650.046.031,00 dan Penyesuaian Belanja Barang Jasa Dikapitalisir Disdik Rp. 16.834.847,00
- ✓ Penyesuaian Pengakuan Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 Rp. 560.224.000,00 dan Penyesuaian Persediaan tahun 2023 Rp. 4.304.068.942,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tahun 2023 Rp.112.153.000,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Tahun 2023 Rp.121.618.000,00

- Selisih beban Jasa Kantor sebesar Rp. 268,091,227.00 merupakan:

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,366,772,000.00	2,319,422,000.00	47,350,000.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	108,600,000.00	108,600,000.00	-
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	-	-
Beban Honorarium Rohaniwan	12,200,000.00	11,900,000.00	300,000.00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	-
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	-	-	-
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	169,500,000.00	169,500,000.00	-
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	62,976,070,000.00	62,976,070,000.00	-
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10,000,000.00	10,000,000.00	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	93,052,512.00	93,052,512.00	-
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	481,905,700.00	481,905,700.00	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	152,800,000.00	110,050,000.00	42,750,000.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6,882,233,374.58	6,792,686,249.58	89,547,125.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	3,495,518,578.32	3,495,518,578.32	-
Beban Jasa Tenaga Supir	742,957,329.10	742,957,329.10	-
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	410,000,000.00	410,000,000.00	-
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	148,500,000.00	148,500,000.00	-
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	23,400,000.00	23,400,000.00	-
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4,937,532,450.00	4,937,532,450.00	-
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1,221,000,000.00	1,221,000,000.00	-
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	14,250,000.00	14,250,000.00	-
Beban Jasa Pengolahan Sampah	12,600,000.00	12,600,000.00	-
Beban Jasa Pengukuran Tanah	20,193,000.00	20,193,000.00	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	206,620,000.00	134,620,000.00	72,000,000.00
Beban Tagihan Telepon	6,586,576.00	6,566,755.00	19,821.00
Beban Tagihan Air	85,335,544.00	86,975,461.00	(1,639,917.00)
Beban Tagihan Listrik	830,495,042.00	828,720,141.00	1,774,901.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	86,784,000.00	86,784,000.00	-

Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	188,731,667.00	188,356,370.00	375,297.00
Beban Penambahan Daya	13,188,051.00	13,188,051.00	-
Beban Registrasi/Keanggotaan	26,950,000.00	26,950,000.00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33,149,194.00	33,149,194.00	-
Beban Lembur	1,841,788,850.00	1,826,174,850.00	15,614,000.00
JUMLAH	87,598,713,868.00	87,330,622,641.00	268,091,227.00

- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Tahun 2023 Rp. 47,350,000.00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Honorarium Rohaniwan Tahun 2023 Rp. 300,000.00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Tahun 2023 Rp. 42.750,000.00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Tahun 2023 Rp. 89,547,125.00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Tahun 2023 Rp. 72,000,000.00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Tagihan Telepon Tahun 2023 Rp. 428.427,00 dan Pengakuan Utang Belanja Tagihan Telepon Tahun 2024 Rp. 408.606,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Tagihan Air Tahun 2023 Rp. 4.151.900,00 dan Pengakuan Utang Belanja Tagihan Air Tahun 2024 Rp. 5.791.817,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Tagihan Listrik Tahun 2023 Rp. 55.907.372,00 dan Pengakuan Utang Belanja Tagihan Listrik Tahun 2024 Rp. 54.132.471,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2023 Rp. 3.094.600,00 dan Pengakuan Utang Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2024 Rp. 2.719.303,00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2023 Rp. 15.614.000,00

- Selisih beban luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 1.536.958.682.00 merupakan :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11,308,530.00	11,308,530.00	-
Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74,381,453.00	74,381,453.00	-
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	2,716,993,656.00	1,180,034,974.00	1,536,958,682.00
JUMLAH	2,802,683,639.00	1,265,724,957.00	1,536,958,682.00

- ✓ Beban Bayar Dimuka Disdik Semester I TA 2024 Rp. 832.704.012,00
- ✓ Penyesuaian Beban Bayar Dimuka Disdik TA 2023 di Semester I 2024 Rp. 62.909.249,00

- ✓ Penyesuaian Beban Bayar Dimuka Disdik TA 2023 dan 2024 di Semester II Rp. 587.950.828,00
- ✓ Beban Bayar Dimuka Disdik Semester II TA 2024 Rp. 1.355.114.747,00

- Selisih beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 47.000.000.00 merupakan :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	516,175,000.00	469,175,000.00	47,000,000.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	39,650,000.00	39,650,000.00	-
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20,000,000.00	20,000,000.00	-
Beban Sewa Mebel	44,280,000.00	44,280,000.00	-
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	23,000,000.00	23,000,000.00	-
Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya	16,000,000.00	16,000,000.00	-
Beban Sewa Peralatan Umum	147,385,000.00	147,385,000.00	-
JUMLAH	806,490,000.00	759,490,000.00	47,000,000.00

- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Tahun 2023 Rp. 47,000,000.00

- Selisih beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.900.000.00 merupakan :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	175,000,000.00	175,000,000.00	-
Beban Sewa Bangunan Gudang	-	-	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6,000,000.00	6,000,000.00	-
Beban Sewa Hotel	6,531,663,000.00	6,531,663,000.00	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	8,300,000.00	3,400,000.00	4,900,000.00
JUMLAH	6,720,963,000.00	6,716,063,000.00	4,900,000.00

- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Tahun 2023 Rp. 4,900,000.00

- Selisih Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebesar Rp. 78.240.000.00 merupakan:

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	149,607,275.00	227,847,275.00	(78,240,000.00)

Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	104,886,025.00	104,886,025.00	-
JUMLAH	254,493,300.00	332,733,300.00	-78,240,000.00

- ✓ Penyesuaian Pengakuan Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain
Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi Tahun 2024 Rp. 78.240.000,00

- Selisih Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
Pelatihan sebesar Rp. 6.000.000.00 merupakan :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	300,200,000.00	294,200,000.00	6,000,000.00
Beban Bimbingan Teknis	197,050,000.00	197,050,000.00	-
JUMLAH	497,250,000.00	491,250,000.00	6,000,000.00

- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Tahun 2023 Rp. 6.000,000.00

- Selisih Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 5.022.750.00 merupakan :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	403,148,655.00	398,125,905.00	5,022,750.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30,750,000.00	30,750,000.00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	54,800,000.00	54,800,000.00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	99,799,300.00	99,799,300.00	-
Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	136,970,650.00	136,970,650.00	-
Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60,067,500.00	60,067,500.00	-
JUMLAH	785,536,105.00	780,513,355.00	5,022,750.00

- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Tahun 2023 Rp. 5,022,750.00

- Selisih Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.500.000 merupakan :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	182,198,920.00	178,698,920.00	3,500,000.00
JUMLAH	182,198,920.00	178,698,920.00	3,500,000.00

- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 3,500,000.00

- Selisih Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 236,738,417,00 merupakan :

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,005,094,214.00	9,790,855,797.00	214,238,417.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	295,115,000.00	272,615,000.00	22,500,000.00
JUMLAH	10,300,209,214.00	10,063,470,797.00	236,738,417.00

- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 Rp. 214.238.417.00
- ✓ Penyesuaian Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2024 Rp. 22,500,000.00

- Selisih Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp. 731.315.597,00 merupakan:

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Barang dan Jasa BOS	279,832,836,184.00	274.882.215.008,00	(731.315.597,00)
JUMLAH	279,832,836,184.00	274.882.215.008,00	(731.315.597,00)

- ✓ Penyesuaian Belanja Barang dan Jasa Bos yang dikapitalisir ke Aset Peralatan dan Mesin Rp. 610.253.883,00
- ✓ Penyesuaian Belanja Barang dan Jasa Bos yang dikapitalisir ke Aset Gedung dan Bangunan Rp. 24.420.000,00
- ✓ Penyesuaian Belanja Barang dan Jasa Bos yang dikapitalisir ke Aset Tetap Lainnya Rp. 124.142.860,00
- ✓ Penyesuaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tidak dikapitalisir Rp. 1.380.945.290,00
- ✓ Penyesuaian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS tidak dikapitalisir Rp. 109.187.050,00

- Selisih Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.

Uraian	Belanja Barang/Jasa LRA	Beban Barang/Jasa LO	Selisih +/-
Beban Barang dan Jasa BLUD	19.827.125.542,00	19.883.469.842,00	(56.344.300,00)
JUMLAH	19.827.125.542,00	19.883.469.842,00	(56.344.300,00)

- ✓ Penyesuaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tidak dikapitalisir Rp.24.084.300,00
- ✓ Penyesuaian Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD tidak dikapitalisir Rp.32.260.000,00

Perkiraan	2024	2024
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	124.123.871.481,72	146.936.561.806,23

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan per Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023.
Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

• Beban Peny. Peralatan dan Mesin	77.227.225.725,53
• Beban Peny. Gedung dan Bangunan	46.844.973.214,83
• Beban Peny Aset Tetap Lainnya	49.446.326,36
• Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.226.215,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi,

Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang Tahun 2019, dapat dilihat pada KIB B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 18.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2024	2023
Ekuitas	3.172.416.159.255,72	3.002.811.051.367,02

1	Ekuitas Awal	3.002.811.051.367,02
2	Koreksi Ekuitas	26.487.362.414,47
3	RK PPKD	2.381.615.787.169,31
4	Surplus/Defisit LO	(2.238.498.041.695,08)
5	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
6	Ekuitas Akhir	3.172.416.159.255,72

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Ekuitas Awal sebesar Rp 3.002.811.051.367,02 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2023.

b) Koreksi Ekuitas Lain-Lain sebesar Rp. 26.487.362.414,47

LAIN-LAIN	26,487,362,414.47
Kas Dana BOS	(466,528,711.00)
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	225,395.07
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	290,850,000.00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5,326,157,999.00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	5,940,000.00
Alat Pengangkat	16,000,000.00
Pompa	40,600,000.00
Mesin Bor	1,350,000.00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1,938,441,573.00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14,000,000.00
Peralatan Bengkel Khusus Peladam	2,800,000.00
Alat Kalibrasi	8,800,000.00
Alat Timbangan/Biara	5,157,739.00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	15,000,000.00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	2,220,000.00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	106,481,971.00
Alat Kantor Lainnya	73,142,500.00
Mebel	241,777,200.00
Alat Pembersih	47,695,946.00
Alat Pendingin	71,771,869.00
Alat Dapur	2,800,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49,391,900.00
Peralatan Studio Video dan Film	38,500,000.00
Alat-Alat Sandi	6,598,000.00
Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	17,500,000.00
Alat Kedokteran Umum	9,600,000.00
Alat Laboratorium Farmasi	1,221,000.00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	18,870,000.00
Alat Laboratorium Pertanian	1,032,300.00
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	300,000,000.00
Alat Peraga Kejuruan	133,941,406.00
Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	558,798,984.00
Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	12,800,000.00
Personal Computer	309,284,800.00
Peralatan Personal Computer	10,500,000.00
Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	17,149,500.00
Alat Peraga Percontohan	31,000,000.00
Peralatan Olahraga Lainnya	20,396,000.00
Bangunan Gedung Kantor	1,283,775,500.00
Bangunan Gudang	225,000,000.00
Bangunan Gedung Instalasi	477,000,000.00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5,520,000,000.00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,100,000,000.00
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7,803,581,900.00
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	209,811,000.00

Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	60,823,000.00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	15,000,000.00
Bangunan Terbuka	363,712,000.00
Bangunan Fasilitas Umum	5,000,000.00
Bangunan Parkir	25,000,000.00
Taman	543,000,000.00
Alat Musik	10,000,000.00
Barang Kerajinan	800,000.00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(933,333.31)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(5,259,523.86)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	(16,071.43)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(102,065,756.10)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(437,499.99)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(46,666.67)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	(146,666.65)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(945,585.52)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(250,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(37,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(7,874,699.38)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1,435,708.33)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(4,371,286.58)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(9,218,355.91)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(5,916,197.92)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(139,999.98)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(4,068,063.23)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(911,666.66)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	(109,966.67)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	(291,666.66)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(1,120,000.00)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(20,350.00)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	(3,459,500.00)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(189,255.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(27,500,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	(14,465,274.01)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(51,723,390.51)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(12,853,383.44)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(218,750.00)

Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(1,786,406.25)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	(516,666.67)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(566,555.54)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(21,352,753.33)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(1,008,333.33)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(2,961,666.67)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(27,800,000.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(5,500,000.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(151,076,757.34)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(1,013,831.67)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(202,743.33)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(25,000.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(962,373.33)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(8,333.33)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(125,000.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(1,115,000.00)
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	18,520.00
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,601,150.00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11,824,000.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400,000.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan	300,000.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	600,000.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15,000,000.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	(19,821.00)
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	303,800.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	324,750.00
Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,286,283.00

c) RK PPKD sebesar Rp. 2.381.615.787.169,31 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2024 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi. Perbedaan Nilai RK PPKD dengan Laporan LRA sebesar Rp. 3.001.049.019,62 terjadi karena Nilai Salur Dana BOS sekolah dan Pendapatan BLUD tidak melalui RK PPKD, dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/defisit di LRA *onface* : 2.378.614.738.149,69

R/K PPKD (LPE)

: 2.381.615.787.169,31

Selisih**3.001.049.019,62**

koreksi BPK - koreksi kas bendahara pengeluaran pembantu cabdin VIII Mentawai Disdik	55,898,092.00	
Koreksi BPK- Koreksi akun escrow bank nagari pada dinas pendidikan dan pengakuan utang belanja pegawai	83,154,260.00	
koreksi BPK - koreksi rekening kas bendahara pengeluaran pada cabdin VIII Disdik	79,440,398.00	
Koreksi BPK - Koreksi kas lainnya dinas pendidikan pada akun escrow bank nagari	104,176,095.31	
Salur Bos Semester I dan II Tahun 2023	422,519,957,711.00	
Pendapatan BLUD	31,761,198,054.41	
Total Pendapatan		454,603,824,610.72
Belanja Barang dan Jasa BOS	274,150,899,411.00	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	28,567,287,981.10	
Realisasi Belanja Hibah Swasta	75,729,741,680.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28,829,661,015.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	313,550,194.00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	380,194,000.00	
Belanja Aset Tetap Lainnya Bos	43,631,441,310.00	
Total Realisasi		451,602,775,591.10
Selisih		3,001,049,019.62

d) **Surplus/Defisit LO** sebesar Rp (2.238.498.041.695,08) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO per Desember Tahun 2024.

e) **Ekuitas Akhir** sebesar Rp. 3.172.416.159.255,72 adalah saldo Ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu : 1) Penyisihan Piutang 2) Beban Dibayar Dimuka 3) Pendapatan Diterima Dimuka 4) Utang Belanja, sedangkan pada Laporan Operasional terdapat akun : 1) Beban Penyusutan dan Amortisasi 2) Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

URAIAN	REALISASI LRA	REALISASI LO	SELISIH (Rp)
	Rp.	Rp.	
PENDAPATAN	31,766,198,054.41	31,808,656,636.64	(42,458,582.23)
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	31,766,198,054.41	31,808,656,636.64	(42,458,582.23)
Retribusi Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	-
Lain-lain PAD yang Sah	31,761,198,054.41	31,803,656,636.64	(42,458,582.23)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	31,766,198,054.41	31,808,656,636.64	(42,458,582.23)
BELANJA	2,410,380,936,204.10	2,270,306,698,331.72	140,074,237,872.38
BELANJA OPERASI	2,133,084,893,265.10	2,270,306,698,331.72	(137,221,805,066.62)
Belanja Pegawai	1,592,002,002,278.00	1,592,415,387,962.00	(413,385,684.00)
Belanja Barang dan Jasa	465,353,149,307.10	478,037,641,516.10	(12,684,492,209.00)
Belanja Hibah	75,729,741,680.00	75,729,741,680.00	-
Beban Penyisihan Piutang	-	55,691.90	(55,691.90)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	124,123,871,481.72	(124,123,871,481.72)
Jumlah Belanja Operasi	2,133,084,893,265.10	2,270,306,698,331.72	(137,221,805,066.62)
BELANJA MODAL	277,296,042,939.00	-	277,296,042,939.00
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	99,093,872,050.00	-	99,093,872,050.00
Belanja Gedung dan Bangunan	134,567,124,579.00	-	134,567,124,579.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	43,635,046,310.00	-	43,635,046,310.00
Jumlah Belanja Modal	277,296,042,939.00	-	277,296,042,939.00
JUMLAH BELANJA	2,410,380,936,204.10	2,270,306,698,331.72	140,074,237,872.38
SURPLUS/ (DEFISIT)	(2,378,614,738,149.69)	(2,238,498,041,695.08)	(140,116,696,454.61)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 TUGAS POKOK SKPD

Berdasarkan peralihan kewenangan yang diamanatkan UU No 23 tahun 2014, pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat lebih dititikberatkan pada pembangunan program :

- a. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan
- c. Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
- d. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

Kondisi pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pasal 2, Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Sedangkan Fungsi Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan.
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan; dan
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 KOMPOSISI PEGAWAI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, menurut ketentuan pasal 3:

Kepala dinas pendidikan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan. Tugas kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Mengkoordinasikan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan;

4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai;
6. Melaksanakan tugas pembantuan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi ini kemudian organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di susun sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang ada agar organisasi dan kelembagaan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di komandoi oleh Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas yang dibantu oleh 4 (empat) bidang, kelompok Jabatan Fungsional, cabang dinas, dan UPTD yakni:

1. Bagian Sekretariat,
2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Luar Biasa (SLB),
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
4. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Cabang dinas; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yakni sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian program dan perencanaan. Bagian Sekretariat memiliki 3 Fungsi diantaranya penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas, penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas dan penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan fungsi ini sekretariat Dinas memiliki sejumlah tugas pokok yang dapat dilihat secara detil pada Peraturan Gubernur No.68 Tahun 2020 tentang Uraian tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dimana terdapat 13 tugas pokok untuk sub bagian umum dan kepegawaian, 12 tugas pokok untuk sub bagian keuangan dan 7 tugas pokok untuk sub bagian program dan perencanaan. Sehingga bagian Sekretariat memiliki 32 total tugas pokok.

Adapun Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup dinas;
2. menyusun konsep rencana strategis dinas;
3. menyusun perencanaan tahunan dinas dan perencanaan lainnya;
4. menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
5. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
7. menyajikan data pelaksanaan kegiatan dinas;
8. menyusun laporan tahunan kegiatan dinas;
9. menyusun konsep pembuatan profil pendidikan; dan
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
11. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan asset/ barang milik negara;
12. mengelola data dan informasi pendidikan;
13. menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan keuangan;
14. menyelenggarakan urusan organisasi dan tatalaksana;
15. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
16. menyelenggarakan urusan kepegawaian;
17. menyusun rancangan peraturan perundang undangan;
18. menyelenggarakan publikasi dan hubungan masyarakat;
19. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
20. menyelenggarakan kerjasama kelembagaan;
21. menyelenggarakan administrasi kearsipan;
22. menyelenggarakan administrasi perpustakaan; dan
23. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pembinaan sekolah menengah atas (SMA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian, Peserta didik serta Sarana Prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang pembinaan sekolah menengah atas (SMA) memiliki 3 fungsi dan 11 Uraian Tugas Pokok dan fungsi.

Bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum dan Kesiswaan, Tenaga Teknis serta Sarana Prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK) memiliki 3 fungsi dan 10 Uraian Tugas Pokok dan fungsi.

Bidang pembinaan sekolah luar biasa (SLB) dan tugas pembantuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang pembinaan sekolah luar biasa (SLB) dan tugas pembantuan memiliki 3 fungsi dan 9 Uraian Tugas Pokok dan fungsi.

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki 3 fungsi dan 5 Uraian Tugas Pokok dan fungsi.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas Dinas dibidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini maka Cabang Dinas memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
2. Pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
4. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Unit pelaksana teknis memiliki tugas pokok adalah melaksanakan sebahagian tugas teknis dan operasional Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera barat sesuai dengan bidangnya, dengan wilayah kerja kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 4 bidang yakni: Sekretariat, Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan SLB, Pembinaan GTK, Cabang Dinas dan ditambah dengan dua urusan yakni UPTD dan kelompok fungsional, sehingga keseluruhan terdapat 67 tugas pokok di bidang pelayanan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Sumber daya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari sumber daya manusia, tenaga honorer, aset/modal dan unit usaha yang berjalan. Pada saat ini jumlah pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 12.372 orang yang terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 5 (Lima) orang, eselon IV sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, Tenaga Fungsional sebanyak 10.683 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga) orang dan staf sebanyak 1.658 (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan) orang.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian kinerja OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 6 Program dan 103 Kegiatan. Dari sisi realisasi anggaran total pencapaian targetnya yaitu mencapai 95,54% sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Realisasi Belanja Operasi mencapai 97,36%, terdiri dari Belanja Pegawai mencapai 97,86%, Belanja Barang dan Jasa mencapai 95,37%. Sedangkan Belanja Modal mencapai 83,48% yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai 78,39%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Mencapai 82,81% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencapai 100,83%.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada undang-undang di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mempergunakannya secara optimal.

Dalam pembuatan laporan keuangan ini, mungkin belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, namun untuk masa yang akan datang akan diupayakan lebih baik dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Semoga dengan dibuatnya Laporan Keuangan ini, OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. BARLIUS, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660630 199103 1 006